

2022

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena berkat rahmatNya jua lah **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2022. Dalam LAKIP disajikan analisis atas kinerja yang telah dicapai dan dikaitkan dengan Perencanaan Strategik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempumaan, namun kami berharap penyusunan LAKIP ini tetap ada manfaatnya, minimal sebagai gambaran untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai dan juga sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Untuk itu kami mohon saran, tanggapan serta kritik yang membangun, untuk lebih menyempurnakan laporan ini di masa-masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan LAKIP ini dapat selesai pada waktunya.

Amuntai, Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara



Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
Pembina Tk. I
NIP.19631120 199203 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	I - 1
B. Aspek Strategik Organisasi	I - 2
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	I - 3
D. Sistematika Penyusunan Laporan	I - 10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	III - 1
B. Analisis Capaian Kinerja	III - 2
C. Capaian Program dan Kegiatan	III - 11
D. Akuntabilitas Keuangan	III -25
BAB IV. PENUTUP	IV - 1
LAMPIRAN	iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Lampiran 3.	Laporan Pengukuran Kinerja 2022
Lampiran 4	Foto-foto kegiatan tahun 2022

**LAKIP
DPPKB KAB. HSU**



**BAB I
PENDAHULUAN**



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya “*Rule Government*” telah bergeser menjadi “*Good Governance*”. Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas (*Accountability*), transparansi (*Transparency*), keterbukaan (*Openes*) dan kerangka hukum (*Rule of law*). Salah satu tuntutan publik dalam penyelenggaraan pemerintah adalah yang 4 (empat) macam di atas dalam pengelolaan keuangan negara agar menjadi pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sejak diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya, pelaporan keuangan dan kinerja di lingkungan instansi pemerintah juga merupakan bagian yang penting guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintahan.

Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/ kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya.

Untuk menilai keberhasilan/ kegagalan tersebut, pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan. Selama ini pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari proses dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, manfaat, keuntungan maupun dampak yang ditimbulkannya.

Berpijak pada konsep tersebut, maka indikator kinerja tidak saja dari aspek input, output, tapi juga sampai pada out come, benefits dan impact dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada gilirannya semua proses yang dilaksanakan untuk dinikmati masyarakat.

Penyusunan LAKIP merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sama halnya dengan fungsi manajemen pada umumnya, SAKIP meliputi kegiatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

Penyusunan LAKIP Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selama Tahun Anggaran 2022. Dimana LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* yaitu pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

B. ASPEK STRATEJIK ORGANISASI

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu dari Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2° sampai 3° Lintang Selatan dan 115° sampai 116° Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Hulu Sungai Utara adalah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan tentang pencapaian sasaran peningkatan kualitas SDM Indonesia yang salah satunya memperkuat kelembagaan Kependudukan dan Keluarga Berencana di daerah, dan merupakan landasan hukum ditetapkannya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tersebut Pengendalian penduduk dan keluarga berencana menitik beratkan pada ; 1) perencanaan kependudukan ; 2) pengendalian kuantitas penduduk ; 3) pengembangan kualitas penduduk ; 4) pelayanan keluarga sejahtera dan Advokasi ; 5) penurunan angka kelahiran (TFR) ; 6) mobilitas penduduk ; 7) penduduk rentan ; 8) pembangunan keluarga ; 9) penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.

Permasalahan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang perlu penanganan lebih lanjut adalah :

1. Peningkatan kualitas kesertaan ber-KB menjadi metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP);
2. Rendahnya kesertaan KB pria sehingga perlu mengoptimalkan peserta KB pria yang sudah ada sebagai motivator melalui pembinaan kelompok KB pria;
3. Masih rendahnya cakupan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga;
4. Tidak semua keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia mengikuti kegiatan kelompok BKB,BKR,BKL hal ini karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan tersebut dan juga masih kurangnya SDM dan keterampilan kader dalam penyuluhan serta seringnya pergantian kader;
5. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi, komunikasi dan informasi dalam berbagai media dan metode, sehingga pemahaman masyarakat tentang program Bangga Kencana masih kurang;dan
6. Meningkatkan integrasi kampung KB dengan lintas sektor.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kesertaan ber KB menjadi MKJP;
2. Peningkatan peran pria dalam ber KB;
3. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih mengalami banyak permasalahan, seperti lemahnya pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL, serta akses permodalan kelompok UPPKS;
4. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi, komunikasi dan informasi dalam berbagai media dan metode, sehingga pemahaman masyarakat tentang program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) masih kurang; dan
5. Penurunan jumlah penduduk miskin dan tertinggal, melalui program Kampung KB;

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang salah satunya adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian:
 1. Sub Bagian Program dan Data;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- b. Bidang Pengendalian Penduduk;
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi;
- d. Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat

- 1 Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala SKPD melaksanakan kesekretariatan dalam urusan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.
- 2 Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset;
 - b. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset;

- c. penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan asset; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
3. Unsur – unsur Organisasi Sekretariat adalah :
- a. Sub Bagian Program dan Data;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Bidang Pengendalian Penduduk

1. Bidang Pengendalian Penduduk merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk di Kabupaten.
2. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - b. Pelaksanaan NSPK bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang sistem informasi keluarga;
 - d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan Kota;
 - f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang pengendalian penduduk;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi

1. Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana dan Advokasi di Kabupaten.
2. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana dan advokasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana dan advokasi;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang keluarga berencana dan advokasi;
- d. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Kabupaten;
- f. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten;
- g. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan advokasi;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang keluarga berencana dan advokasi;
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

1. Bidang Pemberdayaan Keluarga Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera
2. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga S mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Pelaksanaan NSPK bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Bina Keluarga Balita;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Pembinaan Ketahanan Remaja;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;
 - e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha Mikro Keluarga;
 - f. Pemantauan dan evaluasi bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis

Unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kelompok Jabatan Fungsional.

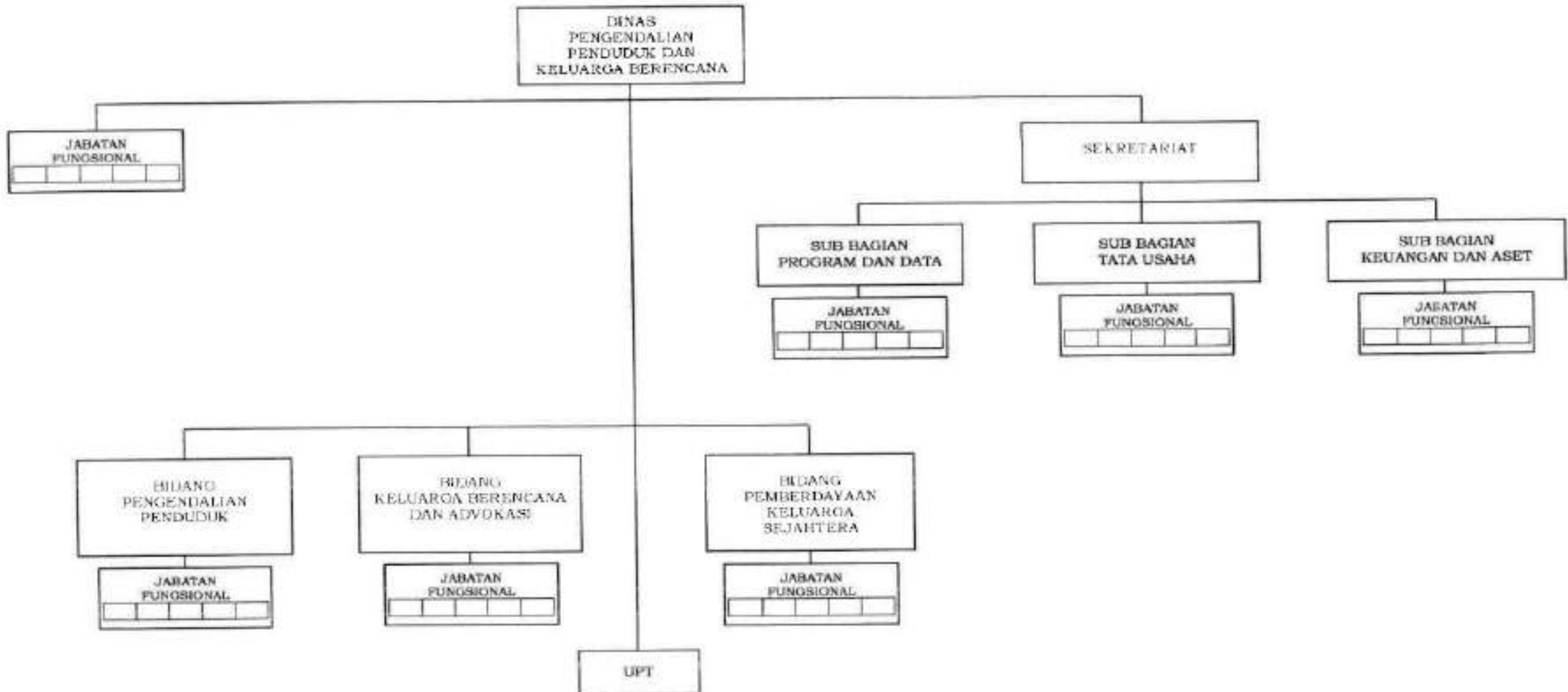
Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara terlihat sebagaimana berikut :

Bagan Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021



Dalam memberikan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 23 orang dan non PNS 34 orang.

Adapun keadaan pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1. Jumlah dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia PNS

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	23 Orang
2	Tingkat Pendidikan	
	▪ SD	-
	▪ SMP	-
	▪ SLTA	3 Orang
	▪ D1	-
	▪ D3	5 Orang
	▪ S1	11 Orang
	▪ S2	4 Orang
3.	Pangkat dan Golongan	
	▪ Pembina Utama Muda (IV/c)	-
	▪ Pembina Tingkat I (IV/b)	2 Orang
	▪ Pembina (IV/a)	5 Orang
	▪ Penata Tingkat I (III/d)	8 Orang
	▪ Penata (III/c)	-
	▪ Penata Muda Tingkat I (III/b)	2 Orang
	▪ Penata Muda (III/a)	3 Orang
	▪ Pengatur Tk. I (II/d)	3 Orang
	▪ Pengatur (II/c)	-
	▪ Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
	▪ Pengatur Muda (II/a)	-
	▪ Juru Muda (I/a)	-

Tabel I.2. Jumlah dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Non PNS

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai Non PNS	34 Orang
2	Tingkat Pendidikan	
	▪ SD	1 Orang
	▪ SLTP	-
	▪ SLTA	3 Orang
	▪ D3	2 Orang
	▪ S1	28 Orang

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Penyajian laporan akuntabilitas ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

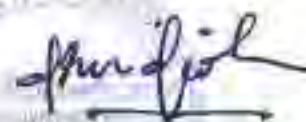
LAMPIRAN

- Dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB serta meningkatkan kualitas KIE bagi petugas KB (PKB/PLKB) agar pemahaman masyarakat tentang Program Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga (Berencana Bangsa) Kencana bertambah/meningkat di seluruh Kecamatan dan Desa;
- Adanya pelatihan untuk peningkatan SDM PLKB dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- Adanya dukungan dana dan sarana dari BKKBN Perwakilan Propinsi Kai-Sel serta dari DAK Fisik dan Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja Adanya rapat bulanan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja petugas KB di lini lapangan;
- Menjalin kerjasama yang baik dengan mitra kerja KB agar dapat meningkatkan sosialisasi program KKBPK/Bangga Kencana;
- Meningkatkan pelayanan KB dan penyuluhan KB metode MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang);
- Meningkatkan kualitas kader kelompok kegiatan (poktan) BKB, BKR dan BKL (TRIBINA) melalui pelatihan kader dan pelatihan keterampilan;
- Pembentukan rumah dataku dan sekolah siaga kependudukan (SSK);
- Meningkatkan kegiatan lintas sektor di desa Kampung KB melalui kegiatan rapat tim pokja Kampung KB dan Forum musyawarah desa Kampung KB dengan tujuan semakin meningkatnya kegiatan lintas sektor di Kampung KB.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dibuat dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan yang diperlukan untuk masa yang akan datang.


Amuntai, Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara



Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19631120 199203 2 004

**LAKIP
DPPKB KAB. HSU**



**BAB II
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA**

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Visi

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah, dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2017, maka ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode tahun 2017-2022 adalah :

“Hulu Sungai Utara MANTAP”

Ungkapan MANTAP sebagaimana visi tersebut di atas merupakan akronim atau singkatan dari MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, AGAMIS dan PRODUKTIF. Berdasarkan visi daerah yang merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, secara umum terkandung pemahaman yakni “terciptanya keadaan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang lebih maju, lebih mandiri, lebih sejahtera, agamis serta lebih produktif dalam menghasilkan karya yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakatnya baik bagi kehidupan pribadi maupun bagi masyarakat secara komunitas. Kemajuan dan peningkatan yang terjadi sebagaimana visi tersebut akan terlihat dari meningkatnya kemajuan pada aspek kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat, meningkatnya kemandirian (mengurangi ketergantungan) dan keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosialnya sehari-hari, meningkatnya kualitas pelayanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana umum serta terselenggaranya suasana religius yang menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Utara selama ini dalam kurun waktu lima tahun ke depan”.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan misi sebagai berikut :

1. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif

Dalam misi ini diharapkan terwujud birokrasi yang bersih dan profesional dengan organisasi dan sistem pemerintahan yang semakin berkualitas. Untuk itu juga perlu ditunjang oleh keberadaan sumberdaya aparatur yang semakin profesional, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima disertai penegakkan aturan perundang-undangan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dengan Ditopang Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah

Dalam misi ini pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi, berdaya saing, dan memiliki kemandirian yang ditunjang oleh kadar keimanan dan ketaqwaan yang semakin baik dan terimplementasi sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas sumber daya masyarakat menjadi salah satu prasyarat utama pencapaian tingkat kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Lokal dengan Berlandaskan Potensi Daerah

Pada misi ini arah pembangunan adalah untuk terciptanya perekonomian masyarakat yang semakin maju dan berkembang dengan berlandaskan pada potensi daerah khususnya rawa. Optimalisasi pemanfaatan lahan rawa dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diupayakan peningkatan pengelolaan lahan rawa secara berkelanjutan, yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas. Disamping itu juga untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan daerah. Secara agregat akan semakin tercipta struktur perekonomian yang kuat dengan tingkat pertumbuhan yang berkualitas dan merata, yang tergambar dengan semakin terwujudnya transformasi ekonomi melalui integrasi perekonomian yang bersifat primer (pertanian) dengan perekonomian yang bersifat sekunder (industri), serta ketimpangan/disparitas yang kecil di masyarakat. Pada misi ini juga dikehendaki perkembangan pada sektor produksi barang dan jasa yang menjadi sektor pelengkap (komplementer) terhadap potensi tenaga kerja lokal yang dimiliki oleh daerah. Dalam konteks ini diupayakan penyerapan tenaga kerja produktif yang lebih banyak. Selanjutnya peran usaha mikro, kecil dan menengah dapat berkembang dan pendapatan perkapita masyarakat dapat meningkat, yang berimplikasi pada penurunan persentase kemiskinan.

4. Membangun infrastruktur Daerah yang Terintegrasi dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Lokal

Infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar untuk memudahkan masyarakat dapat dijangkau oleh layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan juga dapat memudahkan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Arah pembangunan pada misi ini ditujukan untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Selain itu juga menyediakan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan lainnya yang lebih berkualitas dalam menunjang aktivitas kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

5. Melaksanakan Pembangunan Secara Arif Dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam

Pada misi ini diarahkan pada perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup serta terlaksananya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjamin tetap tersedianya sumberdaya fisik maupun sumberdaya hayati secara lestari. Kondisi ini menjadi tuntutan agar semua kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan selalu memperhatikan tata kelola lingkungan yang berkesinambungan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, hal ini ditunjukkan melalui :

a. Pernyataan misi ke I yaitu Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovaif

Dalam misi tersebut diharapkan terwujud birokrasi yang bersih dan profesional dengan organisasi dan sistem pemerintahan yang semakin berkualitas. Untuk itu juga perlu ditunjang oleh keberadaan sumberdaya aparatur yang semakin profesional, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima disertai penegakkan aturan perundang-undangan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Sesuai dengan misi ke-I tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan data-data dan penyusunan laporan, serta melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

b. Pernyataan misi ke II yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Dengan Ditopang Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah.

Dalam misi tersebut menjelaskan tentang pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tingkat pendidikan yang semakin

tinggi, memiliki kualitas kesehatan yang baik, berdaya dan memiliki kemandirian yang ditunjang oleh kadar keimanan dan ketaqwaan yang semakin baik dan terimplementasi sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas sumber daya masyarakat menjadi salah satu prasyarat utama pencapaian tingkat kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sesuai dengan misi ke-II tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam menciptakan keluarga yang ideal dan harmonis sehingga berimbas kepada kesanggupan untuk memberikan hak-hak pendidikan, kesehatan, kecukupan sandang pangan yang pada akhirnya bisa menuju kepada keluarga yang sejahtera, sesuai dengan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait tujuan dalam RPJMD adalah :

1. Mewujudkan birokrasi DPPKB yang bersih, profesional dan produktif
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas

4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan Kesertaan ber-KB

Sedangkan indikator sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 disajikan pada tabel berikut :

II.1 Tabel Indikator Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Visi : Hulu Sungai Utara MANTAP (Maju, MANDiri, sejahTera, Agamis dan Produktif)								
Misi I : Menciptakan Pemerintah yang Bersih, Berwibawa dan Inovatif								
1.	Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	BB	BB	BB	BB	A
Misi II : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Dengan Ditopang Nilai-Nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah								
1.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatkan Kesertaan Ber-KB	Peserta KB Aktif (%)	77	78	79	80	82
			Unmet Need (Kebutuhan ber-KB) (%)	11	2,32	2,22	2,1	2

5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
- 2) Meningkatkan kesertaan ber-KB

Tabel II.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) DPPKB	A
Meningkatkan kesertaan ber-KB	Peserta KB Aktif (%)	82
	Unmet Need (kebutuhan ber-KB) (%)	2

6. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti pada tabel berikut ini :

Tabel II.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara

Visi : Hulu Sungai Utara MANTAP (Maju, MANDiri, sejahTera, Agamis dan Produktif)			
Misi I : Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih, Berwibawa dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas Pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja pemerintah	Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
Misi II : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Dengan Ditopang Nilai-Nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah			
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatkan kesertaan ber-KB	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB serta Pembangunan Keluarga	Peningkatan cakupan pelayanan Keluarga Berencana dan Cakupan Partisipasi Keluarga dalam kegiatan kelompok keluarga sejahtera

7. Indikator Kinerja Utama

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel lampiran

8. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di rubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 kemudian dirubah kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan peraturan tersebut, terdiri dari 4 Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan.

Sedangkan jumlah anggaran sebelum perubahan yang dialokasikan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2022 dari Dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 5.554.841.726,00 dan setelah perubahan Rp. 9.951.990.385,00 dengan program, kegiatan dan sub kegiatan seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel II.4 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2022

No	Program	Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.548.564.670,00
a.		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.060.000,00
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.300.000,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.760.000,00
b.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.712.624.550,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.648.714.000,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63.910.550,00
c.		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.410.000,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.200.000,00
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.210.000,00
d.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	540.424.628,00

		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.763.450,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.016.968,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.767.725,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	69.621.485,00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.255.000,00
e.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.355.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.355.000,00
f.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.690.492,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.923.200,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.213.200,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.050.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.504.092,00
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		298.987.500,00
a.		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	88.223.750,00
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	51.498.750,00
		Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	14.946.875,00
		Sub Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	21.778.125,00
b.		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Cakupan Pengendalian Penduduk Daerah Kabupaten/Kota	210.763.750,00

		Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	39.418.750,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	123.345.000,00
		Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	48.000.000,00
3.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		3.237.792.090,00
a.		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	874.039.015,00
		Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	7.975.000,00
		Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	134.434.015,00
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	60.000.000,00
		Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.630.000,00
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	156.000.000,00
		Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	405.000.000,00
		Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00
b.		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.576.600.000,00
		Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	440.000.000,00
		Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.136.600.000,00
c.		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	424.903.075,00
		Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	92.780.000,00
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	218.868.200,00

		Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10.200.000,00
		Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	103.054.875,00
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	0,00
d.		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	362.250.000,00
		Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	362.250.000,00
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		2.866.646.125,00
a.		Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.866.646.125,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.279.743.000,00
		Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	86.476.875,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.335.400.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	71.956.250,00
		Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	93.070.000,00
		<u>TOTAL</u>	9.951.990.385,00

Tabel II.5 Rincian Alokasi Belanja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)	%
1.	BELANJA OPERASI	8.523.534.385,00	85,65
	Belanja Pegawai	2.659.171.000,00	26,72
	Belanja Barang dan Jasa	5.864.363.385,00	58,93
2.	BELANJA MODAL	1.428.456.000,00	14,35
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.338.006.000,00	13,44
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.450.000,00	0,91
	TOTAL BELANJA	9.951.990.385,00	100,00

9. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja ini memuat rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan Dinas pada tahun 2022 baik yang mendapat dukungan pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Mempertimbangkan sumberdaya, telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2022 sebagai mana yang tercantum dalam tabel lampiran LAKIP.

**LAKIP
DPPKB KAB. HSU**



**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022.

Gambaran keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 75/SK/DPPKB/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dalam tahun anggaran 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan kesertaan ber-KB

Tabel III.1. Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) DPPKB	A	A*	100%

2.	Meningkatkan Kesertaan Ber-KB	Peserta	82%	73,80%	90%
		Unmet Need (kebutuhan ber-KB)	2,0%	13,82%	14,47%

Catatan : Bertanda bintang Nilai SAKIP data merupakan nilai n-1

Penghitungan persentase pencapaian untuk indikator kinerja peserta KB aktif dengan kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik menggunakan rumus 1 yaitu :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan penghitungan persentase pencapaian untuk indikator kinerja unmet need (kebutuhan ber-KB) dengan kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja menggunakan rumus 2 yaitu :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Secara kumulatif rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 adalah cukup berhasil.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) DPPKB	A	A*	100%

Catatan : Bertanda bintang Nilai SAKIP data merupakan nilai n-1

Pencapaian Indikator kinerja nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja ditargetkan kategori "A". Untuk Penilaian SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 dijadwalkan tahun 2023 setelah di evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan di Tahun 2022 penilaian SAKIP dari Inspektorat adalah untuk SAKIP 2021, dimana nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 adalah kategori "A" dengan nilai 82,68.

Untuk pencapaian sasaran tersebut diatas dihitung dengan melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran "Akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", selama Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui program dan Kegiatan dengan hasil sebagai berikut :

Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%
Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%
Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Daerah	100%
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah	100%

Dengan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, maka diharapkan dapat melakukan perbaikan nilai akuntabilitas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana karena dengan tersedia sarana dan prasarana kerja yang optimal dengan didukung SDM yang handal sehingga sasaran-sasaran yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas benar-benar dapat direalisasi sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. ASN diharapkan dapat menjalankan dan memahami tupoksi yang telah diberikan kepada setiap ASN;
2. Menyamakan dan menyatukan persepsi tentang tugas fungsi dalam Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
3. Melakukan atau memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan wawasan ASN;
4. Memberikan reward dan Punishmen kepada ASN.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka peningkatan NILAI SAKIP ini secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran Dinas dengan cara mencari solusi terhadap kendala yaitu :

1. Adanya upaya untuk meningkatkan pencapaian sasaran yang sudah di sepakati bersama;
2. Melakukan perbaikan kinerja ASN dengan pemberian reward dan Punishmen;
3. Fasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan dan pengembangan ASN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Memberikan keleluasaan bagi ASN yang kreatif dalam melakukan pengembangan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kab. Hulu Sungai Utara.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatkan Kesertaan Ber-KB

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu persentase peserta KB aktif dan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	Meningkatkan Kesertaan Ber-KB	Peserta KB Aktif	82%	73,80%	90%
		Unmet Need (kebutuhan ber-KB)	2%	13,82%	14,47%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2022 telah tercapai dengan cukup baik.

Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu : Program Pengendalian Penduduk (sebanyak 2 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan), Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (sebanyak 4 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (sebanyak 1 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan).

a. Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) yang **di targetkan 82% realisasi 73,80% atau 90%** kurang dari target yang ditetapkan, target dari Provinsi Kalimantan Selatan **66,10% atau 112,28%** lebih dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah peserta KB Aktif 26.717 Akseptor dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 36.204 (Sumber: <https://newsiga.bkkbn.go.id/>), sedangkan pada tahun 2021 tercapai **81,57% atau 101,96%**, target dari Provinsi Kalimantan Selatan **66,74%** (Sumber: Statistik Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13).

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah antara lain :

- Terjadinya penurunan capaian dari tahun sebelumnya di antaranya di sebabkan adanya perubahan sistem pencatatan dan pelaporan yang sebelumnya menggunakan rekapitulasi (Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan untuk tahun 2022 sudah menggunakan By Name By Address (New Siga (Sistem Informasi Keluarga)) sehingga data yang disajikan lebih akurat dan akuntabel.
- Adanya dukungan dana dan sarana dari BKKBN Perwakilan Propinsi Kal-Sel serta dari DAK Fisik dan Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja;

- Adanya rapat bulanan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja petugas KB di lini lapangan;
- Menjalin kerjasama yang baik dengan mitra kerja KB agar dapat meningkatkan sosialisasi program Bangga Kencana;
- Peningkatan promosi dan kemitraan dengan meningkatkan promosi dan sosialisasi tentang Program Bangga Kencana, memperkuat jaringan kemitraan dengan lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan lainnya ditingkat kecamatan dan desa, memperkuat dan mengoptimalkan promosi dan KIE melalui kegiatan momentum strategi;
- Penambahan akses dan fasilitas pelayanan KB di Puskesmas, peningkatan penyuluhan dan pelayanan KB khususnya tentang MKJP di seluruh Desa utamanya di daerah kampung KB, serta meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor terkait seperti PKK, IBI, TNI, MUI dan BAZNAS dalam rangka mendorong KB MKJP.

b. Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) yang **di targetkan 2%** realisasi **13,82% atau 14,47%**, target dari Provinsi Kalimantan Selatan **10,40% atau 75,26%** dengan penjelasan Jumlah Unmet Need 5.003 dibandingkan dengan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 36.204 (Sumber: <https://newsiga.bkkbn.go.id/>), sedangkan pada tahun 2020 tercapai **2,26% atau 98,19%**, target dari Provinsi Kalimantan Selatan **8,16%** (Sumber: Statistik Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13).

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Terjadinya penurunan capaian dari tahun sebelumnya di antaranya di sebabkan adanya perubahan sistem pencatatan dan pelaporan yang sebelumnya menggunakan rekapitulasi (Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan untuk tahun 2022 sudah menggunakan By Name By Address (New Siga (Sistem Informasi Keluarga)) sehingga data yang disajikan lebih akurat dan akuntabel
- Dengan memaksimalkan fungsi dari PKB/PLKB Penghubung dan penetapan sasaran fokus pada Pasangan Usia Subur (PUS) baru dan hamil;
- Dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB serta meningkatkan kualitas KIE bagi petugas KB (PKB/PLKB) agar pemahaman masyarakat tentang program KKBPK bertambah/meningkat di seluruh Kecamatan dan Desa;

- Adanya pelatihan untuk peningkatan SDM PLKB dalam pengelolaan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- Adanya dukungan dana dan sarana dari BKKBN Perwakilan Propinsi Kal-Sel serta dari DAK Fisik dan Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja;
- Adanya rapat bulanan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja petugas KB di lini lapangan;
- Menjalinkan kerjasama yang baik dengan mitra kerja KB agar dapat meningkatkan sosialisasi Program Bangga Kencana
- Peningkatan promosi dan kemitraan dengan meningkatkan promosi dan sosialisasi tentang Program Bangga Kencana, memperkuat jaringan kemitraan dengan lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan lainnya ditingkat kecamatan dan desa, memperkuat dan mengoptimalkan promosi dan KIE melalui kegiatan momentum strategis.
- Penambahan akses dan fasilitas pelayanan KB di Puskesmas, peningkatan penyuluhan dan pelayanan KB khususnya tentang MKJP di seluruh Desa utamanya di daerah kampung KB, serta meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor terkait seperti PKK, IBI, TNI, MUI dan BAZNAS dalam rangka mendorong KB MKJP

Untuk mendukung sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka ditopang oleh beberapa sasaran kinerja yang ada di Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi, Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Bidang Pengendalian Penduduk sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional pada tahun 2022, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

III.2 Tabel Realisasi Kinerja Eselon III dan Eselon IV dan Pejabat Fungsional Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Meningkatkan Jumlah Akseptor KB sesuai standarisasi pelayanan KB	Jumlah Peserta KB Baru	6.575 Akseptor	3.970 Akseptor	60,38 %	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi
		Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan	930 Akseptor	907 Akseptor	97,53%	
		Persentase peserta KB baru pria	8%	0,55%	6,88%	

		Persentase Peserta KB MKJP	10%	10,45%	104,50%	
		Jumlah Desa yang terjangkau program KKBPK	219	219	100%	
		Jumlah Desa yang dibina	219	219	100%	
2.	Terlaksananya Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah Klinik yang mendapatkan operasional dan melaporkan penyaluran alat kontrasepsi	45 Klinik	45 Klinik	100%	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penata KKB
		Jumlah Peserta sosialisasi MKJP dan PUP	600 Orang	600 Orang	100%	
3.	Terlaksananya Pelayanan KB	Jumlah Peserta Pelayanan KB MKJP	200 Akseptor	200 Akseptor	100%	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penata KKB
		Jumlah Peserta Pelayanan KB MKJP Pria	0 Akseptor	0 Akseptor	#DIV/0!	
4.	Terlaksananya KIE tentang program KKBPK	Jenis Media KIE	3 Jenis	3 Jenis	100%	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penata KKB
		Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam kegiatan KKBPK	3 Organisasi	3 Organisasi	100%	
		Jumlah Pengelola advokasi konseling dan pembinaan KB dan KR	21 Orang	21 Orang	100%	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan IMP	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	
5.	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB	75%	72,5%	96,67%	Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
		Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR	70%	54,21%	77,44%	
		Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL	65%	63,84%	98,22%	
		Persentase Keluarga yang ikut UPPKS	5%	4,12%	82,40%	
		Persentase Remaja yang ikut PIK	8%	33,44%	418%	
6.	Terlaksananya sosialisasi, orientasi, pelatihan dan pembinaan terhadap kelompok BKB, BKR, BKL serta PIK Remaja/ Mahasiswa	Jumlah peserta sosialisasi	500 Orang	500 Orang	100%	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penata KKB
		Jumlah kelompok yang membuat laporan kegiatan	40 Kelompok	40 Kelompok	100%	

7.	Terlaksananya promosi kegiatan (Poktan)	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penata KKB
		Jumlah sarana kelompok kegiatan (poktan) yang dicetak	4 Jenis	4 Jenis	100%	
8.	Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Kependudukan	Persentase Sekolah Siaga Kependudukan	100%	100%	100%	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
		Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Program KKBPK	100%	100%	100%	
		Jumlah Institusi yang mendukung Program KKBPK	104 Institusi	104 Institusi	100%	
9.	Terlaksananya kegiatan workshop di sekolah	Jumlah Sekolah yang mengikuti kegiatan workshop	10 Sekolah	10 Sekolah	100%	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penata KKB
		Jumlah Sekolah yang menerima advokasi pendidikan kependudukan	12 Sekolah	12 Sekolah	100%	
		Jumlah Stakeholders dan mitra kerja yang memanfaatkan data kependudukan	15 Stakeholders dan mitra kerja	15 Stakeholders dan mitra kerja	100%	
10.	Terlaksananya Pembentukan Rumah Data Kependudukan	Jumlah Rumah Data Kependudukan yang terbentuk	3 Rumah Data Kependudukan Yang Terbentuk	3 Rumah Data Kependudukan Yang Terbentuk	100%	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penata KKB
11.	Terlaksananya Pengelolaan Data Mikro Program KKBPK	Jumlah Desa yang mempunyai Data Mikro Keluarga	219 Desa/ Kelurahan	219 Desa/ Kelurahan	100%	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penata KKB

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perlu dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pelaksanaan RPJMD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baru memasuki tahun ketiga dari target 5 (lima) Tahunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022.

Untuk perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dan terhadap Renstra DPPKB, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.3. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 serta terhadap Renstra DPPKB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Capaian Kinerja (9/6)	Capaian Tahun 2022 terhadap Renstra
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) DPPKB	BB	A*	107,17%	AA	A*	100%	93,31%	100%
2	Meningkatkan kesertaan ber-KB	Persentase peserta KB Aktif	80 %	81,57 %	101,96%	82 %	73,80 %	90%	88,27%	90%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	2,1 %	2,38 %	86,67%	2,0%	13,82 %	14,47%	16,70%	14,47%

*Nilai Catatan : Bertanda bintang Nilai SAKIP data merupakan nilai n-1

Memasuki tahun kelima Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, pencapaian persentase peserta KB aktif pada tahun 2022 adalah sebesar 73,80 % atau 90% dari target akhir Renstra 2017-2022 sebesar 82%, sedangkan untuk indikator menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) tercapai 13,82% atau 14,47% dari target akhir Renstra 2017-2022 sebesar 2%. Pencapaian kinerja tersebut dapat tercapai melalui upaya memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB serta meningkatkan kualitas KIE bagi petugas KB (PKB/PLKB) agar pemahaman masyarakat tentang program Bangga Kencana bertambah/meningkat di seluruh Kecamatan dan Desa sehingga Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda dapat diberikan pelayanan KB.

C. CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk matrik sasaran/kinerja dengan program dan kegiatan DPPKB dapat dilihat pada tabel capaian program dan kegiatan di bawah ini :

Tabel III.4 Matrik Capaian Sasaran/Kinerja dengan Realisasi Program / Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih, produktif dan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPPKB	A	A*	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggara nya urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%
								Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	5 Laporan	5 Laporan	100%

								Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah	100%	100%	100%
								Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	23 Orang	23 Orang	100%
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	1 Laporan	1 Laporan	100%
								Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%
								Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang berpakaian sesuai ketentuan	34 Orang	34 Orang	100%
								Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	4 Orang	0 Orang	0%
								Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	100%	100%

								Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan kantor yang dibutuhkan	17 Jenis Komponen	17 Jenis Komponen	100%
								Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	67 Jenis	67 Jenis	100%
								Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	13 Jenis	13 Jenis	100%
								Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	59 Jenis	59 Jenis	100%
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	27 Kali	27 Kali	100%
								Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	100%	100%	100%

								Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100%	100%	100%
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	5 buah	5 buah	100%
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	111 Buah	111 Buah	100%
								Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	44 buah	44 buah	100%
								Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan pendukung gedung kantor yang dipelihara	16 Buah	16 Buah	100%

2.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatkan Kesertaan ber-KB	Peserta KB Aktif	82%	73,80%	90%	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	100%	100%	100%
									Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Program KKBPK	100%	100%	100%
								Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Institusi yang mendukung Program KKBPK	104 Institusi	104 Institusi	100 %
								Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Kegiatan Workshop	10 Sekolah	10 Sekolah	100%
								Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur	Jumlah Sekolah yang menerima advokasi pendidikan kependudukan	12 Sekolah	12 Sekolah	100%

								Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				
								Sub Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Stakeholders dan mitra kerja Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	15 Stakeholders dan mitra kerja	15 Stakeholders dan mitra kerja	100%
								Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Program KKBPK	100%	100%	100%
								Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan Yang Terbentuk	3 Rumah data kependudukan	3 Rumah data kependudukan	100%
								Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Desa yang mempunyai data mikro keluarga	219 Desa/ Kelurahan	219 Desa/ Kelurahan	100%

								Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
								PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Peserta KB Baru	6.575 Akseptor	3.970 Akseptor	60,38%
								Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Desa Yang Terjangkau Program KKBPK	219 Desa/ Kelurahan	219 Desa/ Kelurahan	100%
								Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Mitra Kerja Yang Terlibat Dalam Kegiatan KKBPK	3 Organisasi	3 Organisasi	100%
								Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jenis Media KIE	4 Jenis	4 Jenis	100%

								Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	Distribusi sarana KIE program KKBP	219 Desa/ Kelurahan	219 Desa/ Kelurahan	100%
								Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	6 Laporan	6 Laporan	100%

								Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	10 Laporan	100%
								Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	10 Laporan	10 Laporan	100%
								Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Desa yang dibina	219 Desa/ Kelurahan	219 Desa/ Kelurahan	100%
								Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan KR	21 Orang	21 Orang	100%

								Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kegiatan Pembinaan IMP	3 Kecamatan	3 Kecamatan	100%
								Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB MKJP	10%	10,45%	104,50%
									Persentase Peserta KB Baru Pria	8%	0,55%	6,88%
								Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah klinik yang mendapatkan operasional dan melaporkan Penyaluran Alat Kontrasepsi	45 Klinik	45 Klinik	100%
								Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta pelayanan KB MKJP	200 Akseptor	200 Akseptor	100%
								Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	5 Laporan	5 Laporan	100%

								termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
								Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Peserta Sosialisasi MKJP dan PUP	600 Orang	600 Orang	100%
								Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah peserta pelayanan KB MKJP Pria	10 Akseptor	0 Akseptor	
								Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan	930 Akseptor	907 Akseptor	97,53%
								Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa	8 Kampung KB	8 Kampung KB	100%

									Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB			
				Unmeet Need (Kebutuhan ber- KB)	2%	13,82%	14,47%	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB	75%	72,50%	96,97%
									Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR	70%	54,21%	77,44%
									Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL	65%	63,84%	82,40%
									Persentase Keluarga yang ikut UPPKS	5%	63,84%	418%
									Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/ Mahasiswa	8%	33,44%	418%
								Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB	75%	72,50%	96,97%

									Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR	70%	54,21%	77,44%
									Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL	65%	63,84%	82,40%
									Persentase Keluarga yang ikut UPPKS	5%	63,84%	418%
									Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/Mahasiswa	8%	33,44%	418%
								Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan yang dicetak	4 Jenis	4 Jenis	100%
								Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta Sosialisasi	500 Orang	500 Orang	100%

								Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	723 Orang	723 Orang	100%
								Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang membuat laporan kegiatan	40 Kelompok	40 Kelompok	100%
								Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

c. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Capaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2022

Dari program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 Program, 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

Sedangkan total anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten HSU Tahun 2022 sebesar Rp. 5.554.841.726,00 dan setelah pergeseran (penambahan DAK Fisik dan Non Fisik) dan perubahan menjadi Rp. 9.951.990.385,00, adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.5 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

No	Program	Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.548.564.670,00	2.824.665.528,00	79,60%
a.		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.060.000,00	17.060.000,00	100 %
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.300.000,00	2.300.000,00	100 %
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.760.000,00	14.760.000,00	100 %
b.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.712.624.550,00	2.224.798.023,00	82,02%
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.648.714.000,00	2.163.046.073,00	81,66%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63.910.550,00	61.751.950,00	96,62%

c.		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.410.000,00	10.200.000,00	70,78%
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.200.000,00	10.200.000,00	100 %
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.210.000,00	0,00	0,00%
d.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	540.424.628,00	420.630.455,00	77,83%
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.763.450,00	5.507.100,00	62,84%
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.016.968,00	202.399.991,00	82,61%
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.767.725,00	48.029.875,00	70,87%
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	69.621.485,00	47.646.440,00	68,44%
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.255.000,00	117.047.049,00	78,42%
e.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.355.000,00	57.941.400,00	64,84%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.355.000,00	57.941.400,00	64,84%
f.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.690.492,00	94.035.650,00	53,83%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.923.200,00	28.997.000,00	61,80%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.213.200,00	28.763.650,00	37,74%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.050.000,00	75.000,00	0,83%

		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.504.092,00	36.200.000,00	85,17%
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		298.987.500,00	270.166.141,00	90,36%
a.		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	88.223.750,00	78.540.236,00	89,02%
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	51.498.750,00	45.080.236,00	87,54%
		Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	14.946.875,00	13.086.875,00	87,56%
		Sub Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	21.778.125,00	20.373.125,00	93,55%
b.		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	210.763.750,00	191.625.905,00	90,92%
		Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	39.418.750,00	30.893.750,00	78,37%
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	123.345.000,00	117.495.000,00	95,26%
		Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	48.000.000,00	43.237.155,00	90,08%

3.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		3.237.792.090,00	2.811.971.363,00	86,85%
a.		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	874.039.015,00	669.248.638,00	76,57%
		Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	7.975.000,00	4.375.000,00	54,86%
		Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	134.434.015,00	65.046.450,00	48,39%
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	60.000.000,00	38.045.000,00	63,41%
		Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.630.000,00	15.850.000,00	22,44%
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	156.000.000,00	156.000.000,00	100 %
		Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	405.000.000,00	383.932.188,00	94,80%
		Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00	6.000.000,00	15,00%
b.		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.576.600.000,00	1.455.000.000,00	92,29%
		Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	440.000.000,00	321.600.000,00	73,09%

		Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.136.600.000,00	1.133.400.000,00	99,72%
c.		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	424.903.075,00	325.472.725,00	76,60%
		Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	92.780.000,00	86.600.000,00	93,34%
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	218.868.200,00	163.324.600,00	74,62%
		Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10.200.000,00	10.200.000,00	100 %
		Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	103.054.875,00	65.348.125,00	63,41%
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	0,00	0,00	#DIV/0!
d.		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	362.250.000,00	362.250.000,00	100 %
		Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	362.250.000,00	362.250.000,00	100 %
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		2.866.646.125,00	2.693.466.300,00	93,96%

a.		Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.866.646.125,00	2.693.466.300,00	93,96%
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.279.743.000,00	1.253.161.300,00	97,92%
		Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	86.476.875,00	84.180.000,00	97,34%
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.335.400.000,00	1.191.850.000,00	89,25%
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	71.956.250,00	71.775.000,00	99,75%
		Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	93.070.000,00	92.500.000,00	99,39%
		<u>TOTAL</u>	9.951.990.385,00	8.600.269.332,00	86,42%

Di lihat dari tabel di atas alokasi anggaran dana untuk belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp. 2.300.000,00 realisasi sebesar Rp. 2.300.000,00 atau 100%, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran sebesar Rp. 14.760.000,00 realisasi sebesar Rp. 14.760.000,00 atau 100%, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan laporan kinerja dan laporan evaluasi.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran Rp. 2.648.714.000,00 realisasi Rp. 2.163.046.073,00 atau 81,66%, kegiatan yang dilaksanakan berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD anggaran Rp. 63.910.550,00 realisasi Rp. 61.751.950,00 atau 96,62%, kegiatan yang dilaksanakan berupa pengelolaan administrasi keuangan berupa pembayaran gaji tenaga kerja non PNS, iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian non PNS serta penyusunan dokumen laporan keuangan.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya anggaran Rp. 10.200.000,00 realisasi Rp. 10.200.000,00 atau 100%, kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan pakaian sasirangan hari jadi Kab. HSU.
- b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi anggaran Rp. 4.210.000,00 realisasi Rp. 0,00 atau 100%, tahun 2022 kegiatan Bimtek ASN tidak terlaksana karena Tidak ada pemanggilan Bimtek dari SKPD yang berwenang.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor anggaran Rp. 8.763.450,00 realisasi Rp. 5.507.100,00 atau 62,84%, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran Rp. 245.016.968,00 realisasi Rp. 202.399.991,00 atau 82,61%, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran Rp. 67.767.725,00 realisasi Rp. 48.029.875,00 atau 70,87%, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan barang cetakan kantor dan penggandaan.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material sebesar Rp. 69.621.485,00 realisasi sebesar Rp. 47.646.440,00 atau 68,44%, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan alat tulis kantor.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran Rp. 149.255.000,00 realisasi Rp. 117.047.049,00 atau 78,42%, kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat koordinasi dan konsultasi, makanan dan minuman rapat dan tamu.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran Rp. 89.355.000,00 realisasi Rp. 57.941.400,00 atau 64,84%, kegiatan berupa pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet serta langganan Koran.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan anggaran Rp. 46.923.200,00 realisasi Rp. 28.997.000,00 atau 61,80%, kegiatan yang dilaksanakan berupa pemeliharaan, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang dan pajak STNK kendaraan roda 2 dan roda 4 mobil dinas operasional atau lapangan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran Rp. 76.213.200,00 realisasi Rp. 28.763.650,00 atau 37,74%, kegiatan yang dilaksanakan pemeliharaan, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang dan pajak STNK kendaraan roda 2 dan roda 4 mobil dinas operasional atau lapangan.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran Rp. 9.050.000,00 realisasi Rp. 75.000,00 atau 0,83% kegiatan yang dilaksanakan berupa Pemeliharaan Peralatan.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya anggaran 42.504.092,00 realisasi Rp.

36.200.000,00 atau 85,17%, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan peralatan pendukung gedung kantor.

2. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

- a. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota anggaran Rp. 51.498.750,00 realisasi Rp. 45.080.236,00 atau 87,54% kegiatan yang dilaksanakan berupa workshop pemanfaatan program kependudukan dalam kebijakan daerah dan penetapan parameter kependudukan.
- b. Sub Kegiatan Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal anggaran Rp. 14.946.875,00 realisasi Rp. 13.086.875,00 atau 87,56% kegiatan yang dilaksanakan berupa pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
- c. Sub Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan anggaran Rp. 21.778.125,00 realisasi Rp. 20.373.125,00 atau 93,55%, kegiatan yang dilaksanakan berupa Integrasi Materi Kependudukan, Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan, Workshop Pengintegrasian Materi Pendidikan Kependudukan.

Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain anggaran Rp. 123.345.000,00 realisasi Rp. 117.495.000,00 atau 95,26% kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan orientasi kader Rumah Dataku.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga anggaran Rp. 48.000.000,00 realisasi Rp. 43.237.155,00 atau 90,08% kegiatan yang dilaksanakan berupa cetak data dan formulir, rapat pengolahan data serta orientasi pemutahiran data keluarga.
- c. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB anggaran Rp. 39.418.750,00 realisasi Rp. 30.893.750,00 atau

78,37% kegiatan yang dilaksanakan berupa Dukungan Siga (Sistem Informasi Keluarga) berupa Paket data komunikasi di Balai Penyuluhan.

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

- a. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja anggaran Rp. 7.975.000,00 realisasi Rp. 4.375.000,00 atau 54,86% kegiatan yang dilaksanakan berupa Advokasi Program Bangga Kencana.
- b. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal anggaran Rp. 134.434.015,00 realisasi Rp. 65.046.450,00 atau 48,39% kegiatan yang dilaksanakan berupa Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK anggaran Rp. 60.000.000,00 realisasi Rp. 38.045.000,00 atau 63,41% kegiatan yang dilaksanakan berupa Dukungan Manajemen Pelaksanaan DAK Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana).
- d. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang anggaran Rp. 70.630.000,00 realisasi Rp. 15.850.000,00 atau 22,44% kegiatan yang dilaksanakan berupa Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik.
- e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) anggaran Rp. 156.000.000,00 realisasi Rp. 156.000.000,00 atau 100,00% kegiatan yang dilaksanakan berupa Mini Lokakarya.
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK anggaran Rp. 405.000.000,00 realisasi 383.932.188,00 atau 94,80% kegiatan yang dilaksanakan berupa Orientasi Tenaga Lini Lapangan, Pembinaan Kader IMP, Penyuluhan KB, Pengolahan data, serta Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB (Air, Litrik, Tenaga Kemanan dan Pramusaji)
- g. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK anggaran Rp40.000.000,00 realisasi 6.000.000,00 atau 15,00% kegiatan yang dilaksanakan berupa Audit Kasus Stunting.

Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- a. Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) anggaran Rp. 440.000.000,00 realisasi Rp. 321.600.000,00 atau 73,09% kegiatan yang dilaksanakan berupa Upah Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan KR (tenaga kontrak PLKB), lomba KB Lestari dan Penyuluh KB.
- b. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) anggaran Rp. 1.136.600.000,00 realisasi Rp. 1.133.400.000,00 atau 99,72 kegiatan yang dilaksanakan berupa gaji tenaga kerja non PNS, honor upah Pelaksanaan KIE oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD, pembuatan laporan PPKBD, serta lomba PPKBD dan Sub PPKBD.

Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya anggaran Rp. 92.780.000,00 realisasi Rp. 86.600.000,00 atau 93,34% kegiatan yang dilaksanakan berupa gaji tenaga kerja non PNS, Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan Alokasi KB, Pelayanan (Klinik KB, Klinik KB Pembantu dan PKBRS), serta Distribusi Alokasi.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) anggaran Rp. 218.868.200,00 realisasi Rp. 163.324.600,00 atau 74,62% kegiatan yang dilaksanakan berupa pelayanan KB Implan, IUD dan MOW.
- c. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya anggaran Rp. 10.200.000,00 realisasi Rp. 10.200.000,00 atau 100,00% kegiatan yang dilaksanakan berupa Koordinasi dan pembinaan Pelayanan KB di Faskes.
- d. Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Jejaringnya anggaran Rp. 103.054.875,00 realisasi Rp. 65.348.125,00 atau 63,41% kegiatan yang dilaksanakan berupa penyuluhan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kampung KB
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria anggaran Rp.0,00

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB anggaran Rp. 362.250.000,00 realisasi Rp.362.250.000,00 atau 100,00% kegiatan berupa pertemuan ketahanan keluarga dan kelompok kerja (pokja) Kampung KB,

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS) anggaran Rp. 1.279.743.000,00 realisasi Rp. .253.161.300,00 atau 97,92% kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan Buku Saku Keluarga Berencana, Buku Administrasi Kelompok, Buku Lembar Balik, Kembang Anak (KKA) Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting, Kit Siap Nikah Anti Stunting.
- b. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) anggaran Rp. 86.476.875,00 realisasi Rp. 84.180.000,00 atau 97,34% kegiatan yang dilaksanakan berupa pembayaran gaji tenaga kerja non PNS, Jambore PIK Remaja, Pelatihan Konselor Sebaya, Rapat dan Pembinaan Poktan.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) anggaran Rp. 1.335.400.000,00 realisasi Rp 1.191.850.000,00atau 89,25% kegiatan yang dilaksanakan berupa Operasional Tim Pendamping Keluarga (Survailance Stunting dan Pendampingan),
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) anggaran Rp. 71.956.250,00 realisasi Rp. 71.775.000,00 atau 99,75% kegiatan yang dilaksanakan berupa Pertemuan Kelompok BKB dan PIK Remaja, serta upah pembuatan laporan Kegiatan Kelompok (BKB, BKL, BKR, PIK Remaja).
- e. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) anggaran sebesar Rp. 93.070.000,00 realisasi sebesar Rp.

92.500.000,00 atau 99,39% kegiatan yang dilaksanakan berupa Peringatan Harganas (Hari Keluarga Nasional), Pameran UPPKS, Lomba (Duta GenRe, BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS).

Dari tabel di atas terlihat, persentase capaian tertinggi terdapat di pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Program Pengendalian Penduduk Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kegiatan berupa Bimtek ASN anggaran Rp. 4.210.000,00 tidak terealisasi atau 0% karena tidak ada pemanggilan Bimtek dari SKPD yang berwenang, sedangkan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran Rp. 9.050.000,00 terealisasi 75.000,00 atau 0,83% , rendahnya realisasi dikarenakan tidak ada Peralatan yang rusak dan memerlukan perbaikan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan Terhadap Capaian Kinerja

Pada tahun 2022 setelah dilakukan analisa program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran, dapat dilihat gambaran ada tidaknya penghematan/efisiensi sumber daya keuangan/anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk analisa efisiensi program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.6 Analisa Efisiensi Program/Kegiatan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Tahun	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Efisiensi	
				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Bertambah / (Berkurang)	Anggaran Bertambah / (Berkurang)
1.	2017	11 Program 34 Kegiatan	5.406.306.789,00		
2.	2018	10 Program 31 Kegiatan	7.821.872.000,00	(1) (3)	2.415.565.211,00
3.	2019	13 Program 30 Kegiatan	8.625.742.000,00	3 (1)	803.870.000,00
4.	2020	11 Program 28 Kegiatan	6.747.186.972,00	(2) (2)	(1.878.555.028,00)
5.	2021	4 Program 13 Kegiatan 37 Sub Kegiatan	9.787.216.050,00	(7) (15) 37	3.040.029.078,00
6.	2022	4 Program 13 Kegiatan 42 Sub Kegiatan	9.951.990.385,00	0 0 5	164.774.335,00

Dari hasil perhitungan perbandingan analisa efisiensi program/kegiatan dan anggaran Tahun 2017 dengan Tahun 2018 dapat dilihat bahwa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara ada efisiensi 1 program dan 3 kegiatan, serta ada penambahan anggaran yang berasal dari dana DAK Fisik dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 2.415.565.211 atau terjadi penurunan efisiensi sebanyak 45%.

Sedangkan hasil perbandingan analisa efisiensi program dan kegiatan anggaran tahun 2019 dengan tahun 2018 tidak ada efisiensi untuk program karena pada tahun 2019 bertambah 3 (tiga) program tetapi ada efisiensi 1 (satu) kegiatan serta penambahan untuk sumber daya keuangan/anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 803.870.000,- atau sebesar 10,3%. Tidak adanya efisiensi untuk program kegiatan disebabkan karena program/kegiatan yang ada di DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 semuanya sangat menunjang atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, serta masih sangat diperlukan untuk

menyelesaikan kinerja yang terdapat dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022.

Perbandingan analisa efisiensi program dan kegiatan tahun 2019 dengan tahun 2020 dapat dilihat terjadi efisiensi 2 program dan 2 kegiatan, serta efisiensi anggaran Rp. 1.878.555.028,- atau sebesar 21,78%.

Perbandingan analisa efisiensi program kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2020 dengan tahun 2021 dapat dilihat terjadi efisiensi 7 program, 15 kegiatan serta penambahan 37 sub kegiatan serta penambahan anggaran sebesar Rp. 3.040.029.078,- atau sebesar 31,06%, karena dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian dirubah kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan pada numenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021, sesuai dengan peraturan tersebut sehingga berubah menjadi 4 Program, 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan.

Perbandingan analisa efisiensi program kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2021 dengan tahun 2022 terdapat penambahan 5 sub kegiatan serta penambahan anggaran sebesar Rp. 164.774.335,00 atau sebesar 1,66%.

**LAKIP
DPPKB KAB. HSU**



**BAB IV
PENUTUP**

BAB IV PENUTUP

Penyusunan LAKIP Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran pada tahun yang bersangkutan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LAKIP ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi dari capaian kinerja yang bersumber dari Sekretariat dan Bidang-bidang yang berada di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dari hasil pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) DPPKB untuk tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator kinerja persentase peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) telah berhasil tercapai sebesar 73,80% dari target yang ditetapkan sebesar 82% dan realisasinya mencapai 90%.
2. Pencapaian indikator kinerja menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) telah berhasil tercapai sebesar 14,47% dari target yang ditetapkan sebesar 2,0% dan realisasinya mencapai 13,82%.

Penurunan capaian dari tahun sebelumnya di antaranya di sebabkan adanya perubahan sistem pencatatan dan pelaporan yang sebelumnya menggunakan rekapitulasi (Rek.Kab.F/II/Dal/13), sedangkan untuk tahun 2022 sudah menggunakan By Name By Address (New Siga (Sistem Informasi Keluarga)) sehingga data yang disajikan lebih akurat dan akuntabel.

Dengan demikian Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2022 telah tercapai dengan cukup baik. Hal ini didukung dengan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu antara lain :

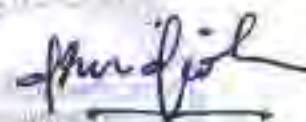
- Dengan memaksimalkan fungsi dari PKB/PLKB Penghubung dan penetapan sasaran fokus pada Pasangan Usia Subur (PUS) baru dan hamil;

- Dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB serta meningkatkan kualitas KIE bagi petugas KB (PKB/PLKB) agar pemahaman masyarakat tentang Program Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga (Berencana Bangsa) Kencana bertambah/meningkat di seluruh Kecamatan dan Desa;
- Adanya pelatihan untuk peningkatan SDM PLKB dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- Adanya dukungan dana dan sarana dari BKKBN Perwakilan Propinsi Kal-Sel serta dari DAK Fisik dan Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja Adanya rapat bulanan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja petugas KB di lini lapangan;
- Menjalin kerjasama yang baik dengan mitra kerja KB agar dapat meningkatkan sosialisasi program KKBPK/Bangga Kencana;
- Meningkatkan pelayanan KB dan penyuluhan KB metode MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang);
- Meningkatkan kualitas kader kelompok kegiatan (poktan) BKB, BKR dan BKL (TRIBINA) melalui pelatihan kader dan pelatihan keterampilan;
- Pembentukan rumah dataku dan sekolah siaga kependudukan (SSK);
- Meningkatkan kegiatan lintas sektor di desa Kampung KB melalui kegiatan rapat tim pokja Kampung KB dan Forum musyawarah desa Kampung KB dengan tujuan semakin meningkatnya kegiatan lintas sektor di Kampung KB.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dibuat dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan yang diperlukan untuk masa yang akan datang.

Amuntai, Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara



Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19631120 199203 2 004

LAMPIRAN

- 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
- 2. PERJANJIAN KINERJA**
- 3. LAPORAN PENGUKURAN KINERJA**
- 4. FOTO-FOTO KEGIATAN TAHUN 2022**

**LAKIP
DPPKB KAB. HSU**



LAMPIRAN 1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

AMUNTAI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah
- Fungsi:
1. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 2. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 3. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
 4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 5. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
 6. pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
 7. pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
 8. pelaksanaan pelayanan KB;
 9. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 10. penyelenggaraan urusan sekretariat
 11. pembinaan kelompok jabatan fungsional
 12. pelaksanaan tugas lain yang dibenarkan atasan sesuai bidang tugasnya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Cara Perhitungan Indikator	Pertanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	LHE SAKIP DPPKB oleh INSPEKTORAT	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	LHE SAKIP DPPKB oleh INSPEKTORAT
2	Meningkatkan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peserta KB Aktif	Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aplikasi Statistik Rutin
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS dengan alasan tidak ber-KB ingin anak dibunda ditambah yang tidak ingin anak lagi dibagi jumlah PUS	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aplikasi Statistik Rutin

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara



Dra. Hj. ANISAH RASVIDAH, M.AP

Pembina Tk I

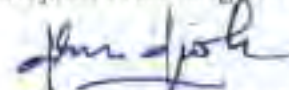
NIP. 19631120 199203 2 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Jabatan	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tugas	Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga 2. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga 3. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk 4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; 5. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana; 6. pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Pecugas Lapangan KB dan kader KB; 7. pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; 8. pelaksanaan pelayanan KB; 9. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesetiaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 10. penyelenggaraan urusan kesekretariatan 11. pembinaan kelompok jabatan fungsional 12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Cara Perhitungan Indikator	Pewanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	LHE SAKIP DPPKB oleh INSPEKTORAT	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	LHE SAKIP DPPKB oleh INSPEKTORAT
2	Meningkatkan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peserta KB Aktif	Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aplikasi Statistik Rutin
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS dengan alasan tidak ber-KB ingin anak ditunda ditambah yang tidak ingin anak lagi dibagi jumlah PUS	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aplikasi Statistik Rutin

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara



Dra. Hj. ANISATI RASYIDAH, M.AP

Pembina Tk I

NIP. 196511201992032004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSU
- Tugas : Membantu Kepala SKPD melaksanakan kesekretariatan dalam urusan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.
- Fungsi : a. Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset
 b. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset
 c. Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset dan
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan / pelaporan yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah target dokumen perencanaan/ pelaporan yang disusun pada tahun berjalan	Sekretariat	Dokumen Kinerja pada sub bagian Program dan Data
		Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah target dokumen keuangan yang disusun pada tahun berjalan		Dokumen keuangan pada sub bagian keuangan
2	Meningkatkan SDM Aparatur sesuai Tupoksi	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah administrasi pegawai yang diselesaikan dibandingkan dengan total pegawai DPPKB pada tahun berjalan	Sekretariat	Data Pegawai
3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja serta Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan terpenuhi dengan baik dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dinyatakan dalam persen		Sub Bagian Tata Usaha
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang yang dibutuhkan dan terpenuhi dengan baik dibandingkan dengan jumlah jasa penunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dinyatakan dalam persen		Sub Bagian Tata Usaha
		Persentase terpeliharanya Barang milik daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan terpenuhi dengan kondisi baik dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dinyatakan dalam persen	Sub Bagian Keuangan dan Aset	

Sekretaris DPPKB Kab. HSU



Dis. Aidillah


NIP. 19650915 199312 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi DPPKB Kab. HSU
 Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana di Kabupaten.
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga Berencana
 b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana
 c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang keluarga berencana
 d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Kabupaten
 e. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten
 f. Pelaksanaan pembinaan keseriaan Ber KB di Kabupaten
 g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana
 h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Keluarga Berencana
 i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Jumlah Akseptor KB yang sesuai standarisasi pelayanan KB	Jumlah Peserta KB Baru	Menunjukkan Angka kuantitas absolut	Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Aplikasi Statistik Rutin
		Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan	Menunjukkan Angka kuantitas absolut		Aplikasi Statistik Rutin
		Persentase Peserta KB MKOP	Jumlah Akseptor MKOP dibagi dengan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)		Aplikasi Statistik Rutin
		Persentase Peserta KB Baru	Jumlah Akseptor KB Baru dibagi dengan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)		Aplikasi Statistik Rutin

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi DPPKB Kab. HSU


Drs. H. Taberaku, MAP
NIP. 196809251993031009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan : Kepala Bidang Advokasi dan Informasi DPPKB Kab. HSU
 Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis dibidang Advokasi dan Informasi
 Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang Advokasi dan Informasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Advokasi dan Informasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - c. Pelaksanaan Pembudayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Advokasi dan Informasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Advokasi dan Informasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Advokasi dan Informasi tentang Program KBPK	Jumlah Peserta KB Baru	Menunjukkan Angka kuantitas absolut.	Bidang Advokasi dan Informasi	Bidang Advokasi dan Informasi
		Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Program KBPK	Jumlah Data Mikro dibandingkan Jumlah Desa		Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA)

Kepala Bidang Advokasi dan Informasi
 DPPKB Kab. HSU

Dr. M. RITALI
 NIP. 19631229 199203 1 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kab. HSU
 Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk di Kabupaten,
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga
 b. Pelaksanaan NSPK bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga
 c. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang sistem informasi keluarga
 d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
 e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten
 f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk
 g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk
 h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dan
 i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Kependudukan	Persentase Sekolah Siaga Kependudukan	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan dibandingkan dengan jumlah seluruh sekolah menengah pertama dan atas di Kab. HSU	Bidang Pengendalian Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk
		Jumlah Institusi yang mendukung program KKBPK	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah Institusi yang mendukung program KKBPK		Bidang Pengendalian Penduduk

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
 DPPKB Kab. HSU

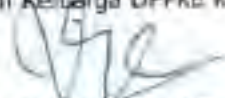
NASRUDDIN SE
 NIP. 196601081993121001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga DPPKB Kab. HSU
- Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
 - b. Pelaksanaan NSPK bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Bina Keluarga Balita
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Pembinaan Ketahanan Remaja
 - e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan
 - f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha Mikro dan Keterampilan Keluarga
 - g. Pemantauan dan evaluasi bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
 - h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga
 - i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB	Jumlah keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB dibagi Jumlah balita	Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Aplikasi Statistik Rutin
		Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR	Jumlah keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR dibagi jumlah remaja		Aplikasi Statistik Rutin
		Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL	Jumlah keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL dibagi jumlah lansia		Aplikasi Statistik Rutin
		Persentase Keluarga yang ikut UPPKS	Jumlah keluarga yang ikut UPPKS dibagi Jumlah keluarga		Aplikasi Statistik Rutin
		Persentase Remaja yang ikut PIK	Jumlah remaja yang ikut PIK dibagi Jumlah remaja		Aplikasi Statistik Rutin

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga DPPKB kab. HSU


Dra. VIVI SUPRIHATI
NIP. 19730218 199403 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha DPPKB Kab. HSU
- Tugas : Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tata usaha
- Fungsi : a. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata usaha
 b. Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tata usaha; dan
 c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa langganan yang terpenuhi dibagi jumlah seluruh kebutuhan jasa langganan	Sekretariat	DPA SPJ Pembayaran Langganan telepon, listrik, air dan internet
		Persentase ATK yang digunakan	Jumlah ATK yang digunakan dibandingkan dengan total jumlah ATK yang direncanakan pada tahun berjalan		DPA dan SPJ
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah barang yang dicetak dan digandakan pada tahun berjalan		DPA dan SPJ
		Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/penerangan kantor yang dibutuhkan	Jumlah Jaringan Listrik yang diperbaiki/diganti pada tahun berjalan		DPA dan SPJ
		Jumlah peratatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah barang yang disediakan pada tahun berjalan		DPA dan RKBU
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan rapat yang dilaksanakan pada tahun berjalan		DPA dan SPJ
2	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang berpakaian sesuai ketentuan	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah pegawai yang berpakaian sesuai ketentuan	Sekretariat	DPA dan SPJ

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
DPPKB kab. HSU



AHMAD MAIMUN
NIP. 19650517 198602 1 020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SJNGAI UTARA

- Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset DPPKB Kab. HSU
- Tugas : Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program
- Fungsi : a. Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis keuangan dan aset
 b. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan dan aset
 c. Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan dan aset
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Cara Perhitungan Indikator	Pesanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	Jumlah dokumen/laporan keuangan yang diselesaikan pada tahun berjalan	Sekretariat	Aplikasi SIMDA Keuangan dan Aplikasi SIMDA BMD
		Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan pada tahun berjalan		DPA dan SPJ
2	Memelihara Sarana dan Prasarana Kerja agar dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara pada tahun berjalan		DPA dan RKBU
		Jumlah peralatan pendukung gedung kantor yang dipelihara	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah peralatan pendukung gedung kantor yang dipelihara pada tahun berjalan		DPA dan RKBU
		Gedung dalam kondisi baik	Persentase kondisi gedung kantor terpelihara dengan baik		DPA dan SPJ

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 DPPKB Kab. HSU



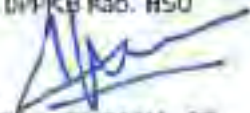
Hj. LIFA ENDRIATI, S.Sos
NIP. 19660618 198803 2 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Data DPPKB Kab. HSU
 Tugas : Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan program dan data
 Fungsi : a. Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program dan data
 b. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan data
 c. Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan data
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Cara Perhitungan Indikator	Pesanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah laporan yang disusun	Menunjukkan angka kuantitas absolut mengenai jumlah laporan yang disusun pada tahun berjalan	Sekretariat	Dokumen laporan pada sub bagian Program dan Data
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Menunjukkan angka kuantitas absolut mengenai jumlah dokumen perencanaan yang disusun pada tahun berjalan		Dokumen perencanaan pada sub bagian Program dan Data

Kepala Sub Bagian Program dan Data
 DPPKB Kab. HSU


ERMA RUSANA, ST
 NIP 19790306 200604 2 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan** : Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB DPPKB Kab. HSU
- Tugas** : Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten.
- Fungsi** : a. Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan jaminan pelayanan KB
 b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan pelayanan KB
 c. Pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan pelayanan KB
 d. Pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten
 e. Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan jaminan pelayanan KB
 f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, dan
 g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pelayanan KB	Jumlah Peserta Pelayanan KB MKJP	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah akseptor pelayanan KB MKJP	Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	DPA dan SPJ
		Jumlah Peserta Pelayanan KB MKJP Pria	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah akseptor pelayanan KB MKJP Pria		DPA dan SPJ

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB
 DPPKB Kab. HSU



ERNAWATI, Am.Keb
NIP. 19710905 199103 2 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan** : Kepala Seksi Kesertaan Ber-KB dan Kesehatan Reproduksi DPPKB Kab. HSU
- Tugas** : Melaksanakan tugas persiapan bahan pembinaan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB, pengendalian dan pendistribusian Aikont di Kabupaten.
- Fungsi** :
- Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana juga pengendalian dan pendistribusian aikont
 - Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Peserta ber KB dan Kesehatan Reproduksi
 - Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana, pengendalian dan pendistribusian aikont
 - Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB, pengendalian dan pendistribusian Aikont di Kabupaten
 - Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana, pengendalian dan pendistribusian aikont
 - Pelaksanaan urusan ketatausahaan, dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Laporan pencatatan KIE BP4 di Kecamatan	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah laporan pencatatan KIE BP4 di Kecamatan pada tahun berjalan	Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	DPA dan SPJ
		Jumlah klinik yang mendapatkan operasional dan melaporkan penyaluran alat kontrasepsi	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah klinik yang mendapatkan operasional dan melaporkan penyaluran alat kontrasepsi pada tahun berjalan		DPA dan SPJ
		Jumlah peserta sosialisasi MKJP dan PUP	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah peserta sosialisasi MKJP dan PUP pada tahun berjalan		DPA dan SPJ

Kepala Seksi Kesertaan Ber-KB dan
Kesehatan Reproduksi DPPKB Kab. HSU



Hj. RUSITAH, Am.Keb
NIP. 19680220 198803 2 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan : Kepala Seksi Advokasi dan Kemitraan DPPKB Kab. HSU
- Tugas : 1. Persiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta penantuan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi, KIE
- Fungsi : a. Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Advokasi, KIE dan Kemitraan
 b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
 c. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Advokasi, KIE dan Kemitraan
 d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi, KIE dan Kemitraan
 e. Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Advokasi, KIE dan Kemitraan dan
 f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasasi sesuai bidang tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Tertaksananya KIE tentang Program KKBP	Jenis Media KIE	Angka kuantitas absolut mengenai jenis media KIE yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Bidang Advokasi dan Informasi	DPA dan SPI
		Jumlah Mitra Kerja yang terlibat dalam kegiatan KKBP	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah mitra kerja yang terlibat pada tahun berjalan	Bidang Advokasi dan Informasi	DPA dan SPI
		Jumlah pengelola advokasi konseling dan pembinaan KB dan KR	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah pengelola advokasi konseling dan pembinaan KB dan KR pada tahun berjalan	Bidang Advokasi dan Informasi	DPA dan SPI
		Jumlah Kegiatan Pembinaan IMP	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah kegiatan pembinaan IMP pada tahun berjalan	Bidang Advokasi dan Informasi	DPA dan SPI

Kepala Seksi Advokasi dan Kemitraan
 DPPKB Kab. HSU



M. YUSUF, S.Sos
NIP. 19660104 199201 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan : Kepala Seksi Pelaporan dan Pengolahan Data DPPKB Kab. HSU
 Tugas : Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemolmbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan Informasi
 Fungsi : a. Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis pelaporan dan pengolahan data
 b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaporan dan pengolahan data
 c. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaporan dan pengolahan data
 d. Pemantauan dan evaluasi data dan Informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 e. Penyusunan pelaporan dan pengolahan data
 f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
 g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan Indikator	Pesanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Tertaksananya Pengelolaan Data Mikro Program KKBPK	Jumlah Desa yang mempunyai Data Mikro Keluarga	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah desa yang mempunyai data mikro keluarga	Bidang Advokasi dan Informasi	Aplikasi Sistem Informasi Keluarga

Kepala Seksi Pelaporan dan Pengolahan Data
 DPPKB Kab. HSU


MAHYUNI, S.KM, M.IP
NIP. 19721104 199303 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan** : Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga DPPKB Kab. HSU
- Tugas** : Melakukan penyusunan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia.
- Fungsi** : a. Pelaksanaan NSPK bidang ketahanan keluarga
 b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
 c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga balita
 d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga lansia dan rentan
 e. Pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia
 f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan Indikator	Peranggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Sosialisasi, Orientasi, pelatihan dan Pembinaan terhadap Kelompok BKB, BKR, BKL serta PIK Remaja/Mahasiswa	Jumlah Peserta Sosialisasi	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah peserta sosialisasi pada tahun berjalan	Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	DPA dan SPJ
		Jumlah Kelompok yang membuat laporan kegiatan	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah kelompok yang membuat laporan kegiatan pada tahun berjalan		DPA dan SPJ

Kepala Seksi Ketahanan Keluarga
DPPKB Kab. HSU



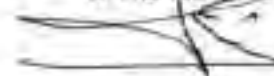
Dra. Hj. SITI RUSIAH
NIP. 19670623 199503 2 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga DPPKB Kab. HSU
- Tugas : Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera
 b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan keluarga sejahtera
 c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui usaha mikro dan keterampilan keluarga
 d. Pembinaan pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemberdayaan Keluarga
 e. Pemantauan dan evaluasi Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi seksi bidang pemberdayaan keluarga
 g. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dan
 h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Tertindakannya Promosi Kelompok Kegiatan (Poktan)	Jumlah Kegiatan pemeran yang diikuti	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah kegiatan pemeran yang diikuti pada tahun berjalan	Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	DPA dan SPJ
		Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan (Poktan) yang dicetak	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah sarana kelompok kegiatan (POKTA/N) yang dicetak pada tahun berjalan		DPA dan SPJ

Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga
 DPPKB Kab. HSU



SUHAIMI, S.Sos
NIP. 19640503 198602 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan : Kepala Seksi Analisa Dampak Penduduk DPPKB Kab. HSU
 Tugas : Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemetaan
 Fungsi : a. Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis analisa dampak kependudukan
 b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria analisa dampak kependudukan
 c. Pembinaan pelaksanaan dan pengawasan analisa dampak kependudukan
 d. Pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten; dan
 e. Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban analisa dampak kependudukan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
 f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pembentukan Rumah Data Kependudukan	Jumlah Rumah Data Kependudukan yang terbentuk	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah rumah data kependudukan yang terbentuk	Bidang Pengendalian Penduduk	DPA dan SPJ

Kepala Seksi Analisa Dampak Kependudukan
 DPPKB Kab. HSU



Dra. ISMAWATI
NIP. 19670818 199312 2 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Jabatan** : Kepala Seksi Pendidikan Dan Kependudukan DPPKB Kab. HSU
- Tugas** : Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di Kabupaten.
- Fungsi** :
- Perumusan Program, pedoman dan petunjuk teknis pendidikan Kependudukan
 - Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Pendidikan dan Kependudukan
 - Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Pendidikan Kependudukan
 - Pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di Kabupaten
 - Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kependudukan
 - Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.


No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Kependudukan	Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Bidang Pengendalian Penduduk	DPA dan SPJ
		Jumlah Stakeholders dan Mitra Kerja yang memanfaatkan data Kependudukan	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah Stakeholders dan Mitra Kerja yang memanfaatkan data kependudukan	Bidang Pengendalian Penduduk	DPA dan SPJ
		Jumlah Sekolah yang mengikuti kegiatan workshop	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan workshop	Bidang Pengendalian Penduduk	DPA dan SPJ
		Jumlah Sekolah yang menerima advokasi pendidikan kependudukan	Angka kuantitas absolut mengenai jumlah sekolah yang menerima advokasi pendidikan kependudukan	Bidang Pengendalian Penduduk	DPA dan SPJ

Kepala Seksi Pendidikan Dan Kependudukan
DPPKB Kab. HSU



Dra. Hj. NITA YUSPIANTI, M. IP
NIP. 19671121 199302 2 002

**LAKIP
DPPKB KAB. HSU**



**LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA**



PERJANJIAN KINERJA

*DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA*

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
AMUNTAI
2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP**
Jabatan : **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. HUSAIRI ABDI, Lc**
Jabatan : **Pit. BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Kedua,


H. HUSAIRI ABDI, Lc

Pihak Pertama,


Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
Pembina Tk I
NIP. 19631120 199203 2 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	
1	2	3	4	
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	1 Nilai SAOP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A	kategori
2	Meningkatkan Kesertaan Ber-KB	1 Peserta KB Aktif	82	%
		2 Unmet Need (Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	2,0	%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.779.812.095	
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 1.099.183.740	
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 422.460.451	
4	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 253.385.440	
Total Anggaran 2022		Rp. 5.554.841.726	

Amuntal, Januari 2022

Plt. Bupati Hulu Sungai Utara

H. HUSAMRI ABDI, Lc

**Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB**

Dra. Hi. ANISAH RASYIDAH, M.AP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19631120 199203 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Aidillah**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP**

Jabatan : **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP

Drs. Aidillah

NIP. 19631120 199203 2 004

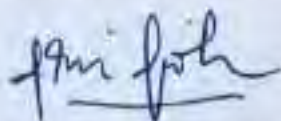
NIP. 19650915 199312 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	100%
2.	Meningkatkan SDM Aparatur sesuai Tupoksi	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Daerah	100%
3.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja serta Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100%
		Persentase jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%
		Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.779.812.095,-	


Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
NIP. 19631120 199203 2 004

Amuntai, Januari 2022

Sekretaris



Drs. Aidillah
NIP. 19650915 199312 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. VIVI SUPRIHATI**

Jabatan : **Kabid Pemberdayaan Keluarga Sejahtera DPPKB**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP**

Jabatan : **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
NIP. 19631120 199203 2 004

Amuntai, Januari 2022

Pihak Pertama,

Dra. VIVI SUPRIHATI
NIP. 19730218 199403 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2022
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

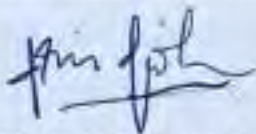
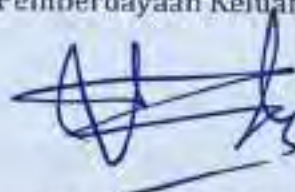
No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB	75%
		Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR	70%
		Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL	65%
		Persentase Keluarga yang ikut UPPKS	5%
		Persentase Remaja yang ikut PIK	8%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	422.460.451,-	

Amuntai, Januari 2022

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabid Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
NIP. 19631120 199203 2 004

Dra. VIVI SUPRIHATI
NIP. 19730218 199403 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN ADVOKASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. TABERANI, MAP**

Jabatan : **Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Advokasi DPPKB**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP**

Jabatan : **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Kedua,

Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
NIP. 19631120 199203 2 004

Pihak Pertama,

Drs. H. Taberani, MAP
NIP. 19680925 199303 1 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN ADVOKASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Jumlah Akseptor KB yang sesuai standarisasi pelayanan KB	Jumlah Peserta KB Baru	6.575 Akseptor
		Persentase Peserta KB MKJP	10%
		Persentase peserta KB baru pria	8%
		Jumlah peserta KB aktif tambahan	930 Akseptor
		Jumlah Desa yang terjangkau Program KKBPK	219 Desa/Kelurahan
		Jumlah Desa yang dibina	219 Desa/Kelurahan

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.099.183.740,-	

Amuntal, Januari 2022

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
NIP. 19631120 199203 2 004

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi

Drs. H. Taberani, MAP
NIP. 19680925 199303 1 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NASRUDDIN, SE**
Jabatan : **Kabid Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP**
Jabatan : **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
NIP. 19631120 199203 2 004

NASRUDDIN, SE
NIP. 19660108 199312 1 001

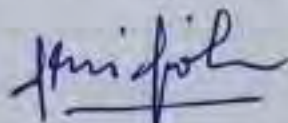
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Kependudukan	Persentase Sekolah Siaga Kependudukan	100%
		Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Program KKBPK	100%
		Jumlah Institusi yang mendukung program KKBPK	104 Institusi

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pengendalian Penduduk	253.385.440,-	

Amuntai, Januari 2022

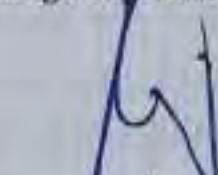
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP

NIP. 19631120 199203 2 004

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk



NASRUDDIN, SE

NIP. 19660108 199312 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Akhmad Maimun**

Jabatan : **Kasubbag Tata Usaha Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. AIDILLAH**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. AIDILLAH

NIP. 19650915 199312 1 001

Akhmad Maimun

NIP. 19650517 198603 1 020

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	100%
		Jumlah ATK yang disediakan	59 Jenis
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	13 Jenis
		Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/penerangan kantor yang dibutuhkan	17 Jenis Komponen
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	67 Jenis
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	27 Kali
2.	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang berpakaian sesuai ketentuan	34 Orang
		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	4 Orang

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.355.000,-	
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.355.000,-	
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	725.197.978,-	
2.1	Penyediaan Bahan/Material	76.084.085,-	
2.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.767.725,-	
2.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	33.763.450,-	
2.3	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	374.424.718,-	
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.158.000,-	

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.695.000,-
3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.325.000,-
3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.370.000,-

Sekretaris



Drs. AIDILLAH

NIP. 19650915 199312 1 001

Amuntai, Januari 2022

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Akhmad Maimun

NIP. 19650517 198603 1 020



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. LINA INDRIATI, S.Sos**
Jabatan : **Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. AIDILLAH**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. AIDILLAH
NIP. 19650915 199312 1 001

Amuntai, Januari 2022

Pihak Pertama,

Hj. LINA INDRIATI, S.Sos
NIP. 19660618 198803 2 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	1 Laporan
		Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	23 Orang
2.	Memelihara Sarana dan Prasarana Kerja agar dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	5 Buah
		Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	111 Buah
		Jumlah Peralatan Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	16 Buah
		Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	44 Buah

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.742.423.750,-	
1.1	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	65.109.750,-	
1.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.677.314.000,-	
2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.940.492,-	
2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.173.200,-	
2.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.213.200,-	

- | | |
|--|--------------|
| 2.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.050.000,- |
| 2.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 42.504.092,- |

Amuntai, Januari 2022

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Data



Drs. AIDILLAH

NIP. 19650915 199312 1 001



Hj. LINA INDRIATI, S.Sos

NIP. 19660618 198803 2 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERMA RUSANA, ST**
Jabatan : **Kasubbag Program dan Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. AIDILLAH**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. AIDILLAH
NIP. 19650915 199312 1 001

ERMA RUSANA, ST
NIP 19790306 200604 2 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah laporan yang disusun	5 Laporan
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	5 Dokumen

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.199.875,-	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.674.875,-	
1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.525.000,-	

Amuntai, Januari 2022

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Program dan Data




Drs. AIDILLAH

ERMA RUSANA, ST

NIP. 19650915 199312 1 001

NIP 19790306 200604 2 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Hj. Siti Rusiah**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. VIVI SUPRIHATI**
Jabatan : **Kabid Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Kedua,

Dra. VIVI SUPRIHATI

NIP. 19730218 199403 2 001

Pihak Pertama,

Dra. Hj. Siti Rusiah

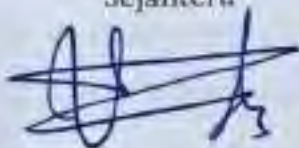
NIP. 19670623 199503 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Sosialisasi, orientasi, pelatihan dan Pembinaan terhadap Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS serta PIK Remaja/Mahasiswa	Jumlah Peserta Sosialisasi	700 Peserta
		Jumlah kelompok yang membuat laporan kegiatan	130 Kelompok

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	241.960.451,-	
1.1	Orientasi /Pelatihan Teknis Pelaksana / Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	137.960.451,-	
1.2	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	104.000.000,-	

Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

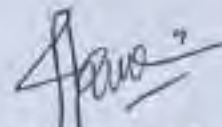


Dra. VIVI SUPRIHATI

NIP. 19730218 199403 2 001

Amuntai, Januari 2022

Analisis Kebijakan Ahli Muda



Dra. Hj. Siti Rusiah

NIP. 19670623 199503 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Suhaimi, S.Sos**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. VIVI SUPRIHATI**
Jabatan : **Kabid Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Pertama,

Suhaimi, S.Sos

NIP. 19640503 198602 1 007

Pihak Kedua,

Dra. VIVI SUPRIHATI

NIP. 19730218 199403 2 001

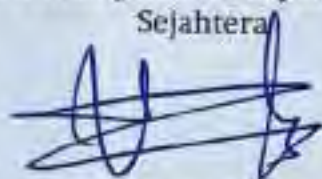
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Promosi kelompok kegiatan (Poktan)	Jumlah pameran yang diikuti	2 Kegiatan
		Jumlah sarana kelompok kegiatan (poktan) yang dicetak	4 Jenis

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	180.500.000,-	
1.1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	115.000.000,-	
1.2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	65.500.000,-	

Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga
Sejahtera



Dra. VIVI SUPRIHATI

NIP. 19730218 199403 2 001

Amuntal, Januari 2022
Analisis Kebijakan Ahli Muda



Suhaimi, S.Sos

NIP. 19640503 198602 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. RUSITAH, Am.Keb**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. Taberani, MAP**
Jabatan : **Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. Taberani, MAP

NIP. 19680925 199303 1 009

Hj. RUSITAH, Am.Keb

NIP. 19680220 198803 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah klinik yang mendapatkan operasional dan melaporkan penyaluran alat kontrasepsi	45 Klinik
		Jumlah peserta sosialisasi MKJP dan PUP	600 Orang

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	206.419.875,-	
1.1	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	81.980.000,-	
1.2	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	124.439.875,-	

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi



Drs. H. Taberani, MAP
NIP. 19680925 199303 1 009

Amuntai, Januari 2022
 Analis Kebijakan Ahli Muda



Hj. RUSITAH, Am.Keb
NIP. 19680220 198803 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERNAWATI, Am.Keb**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. Taberani, MAP**
Jabatan : **Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Drs. H. Taberani, MAP


ERNAWATI, Am.Keb

NIP. 19680925 199303 1 009

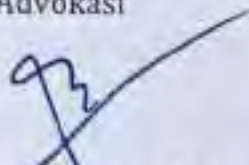
NIP. 19710905 199103 2 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pelayanan KB	Jumlah Peserta Pelayanan KB MKJP	200 Akseptor
		Jumlah Peserta Pelayanan KB MKJP Pria	10 Akseptor

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	128.334.750,-	
1.1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	102.639.750,-	
1.2	Peningkatan Kesertaan KB Pria	25.695.000,-	

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi

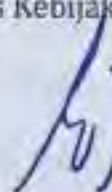


Drs. H. Taberani, MAP

NIP. 19680925 199303 1 009

Amuntai, Januari 2022

Analisis Kebijakan Ahli Muda



ERNAWATI, Am.Keb

NIP. 19710905 199103 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. YUSUF, S.Sos**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. Taberani, MAP**
Jabatan : **Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Drs. H. Taberani, MAP

M. YUSUF, S.Sos

NIP. 19680925 199303 1 009

NIP. 19660104 199201 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

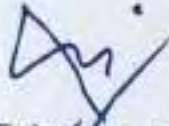
No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya KIE tentang Program KKBPK	Jenis Media KIE	4 Jenis
		Jumlah Mitra Kerja yang terlibat dalam kegiatan KKBPK	3 Organisasi
		Jumlah pengelola advokasi konseling dan pembinaan KB dan KR	39 Orang
		Jumlah kegiatan pembinaan IMP	3 Kegiatan

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	201.529.115,-	
1.1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	173.131.765,-	
1.2	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	28.397.350,-	
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	562.900.000,-	
2.1	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	476.500.000,-	

2.2 Penggerakan Kader Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP)

86.400.000,-

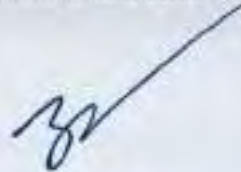
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan
Advokasi



Drs. H. Tabefani, MAP

NIP. 19680925 199303 1 009

Amuntai, Januari 2022
Analisis Kebijakan Ahli Muda



M. YUSUF, S.Sos

NIP. 19660104 199201 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAHYUNI, S.KM, M.IP**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NASRUDIN, SE**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NASRUDIN, SE

NIP. 19660108 199312 1 003

Amuntai, Januari 2022

Pihak Pertama,

MAHYUNI, S.KM, M.IP

NIP. 19721104 199303 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengelolaan Data Mikro Program KKBPK	Jumlah Desa yang mempunyai Data Mikro Keluarga	219 Desa/Kelurahan

NO	KEGIATAN DAN SUB PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	118.180.000,-	
1.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	118.180.000,-	

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk


NASRUDIN, SE

NIP. 19660108 199312 1 003

Amuntai, Januari 2022
 Analis Kebijakan Ahli Muda


MAHYUNI, S.KM, M.IP

NIP. 19721104 199303 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Ismawati**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai
Utara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NASRUDIN, SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai
Utara**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Kedua,

NASRUDIN, SE

NIP. 19660108 199312 1 003

Pihak Pertama,

Dra. Ismawati

NIP. 19670818 199312 2 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**


No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pembentukan Rumah Data Kependudukan	Jumlah Rumah Data Kependudukan yang terbentuk	3 Rumah Data Kependudukan

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	51.979.390,-	
1.1	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	51.979.390,-	

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk


NASHUDIN, SE
 NIP. 19660708 199312 1 003

Amuntai, Januari 2022
Analisis Kebijakan Ahli Muda


Dra. Ismawati
 NIP. 19670818 199312 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Hj. MITA YUSPIANTI, M. IP**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai
Utara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NASRUDIN, SE**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai
Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NASRUDIN, SE

NIP. 19660108 199312 1 003

Amuntai, Januari 2022

Pihak Pertama,

Dra. Hj. MITA YUSPIANTI, M. IP

NIP. 19671121 199302 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Kegiatan pendidikan kependudukan	Jumlah Stakeholders dan mitra kerja yang memanfaatkan data kependudukan	15 Stakeholders dan mitra kerja
		Jumlah Sekolah yang mengikuti kegiatan workshop	10 Sekoah
		Jumlah Sekolah yang menerima advokasi pendidikan kependudukan	12 Sekolah

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	83.226.050,-	
1.1	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	37.948.605,-	
1.2	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	15.873.870,-	
1.3	Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	29.403.575,-	


Kepala Bidang Pengendalian Penduduk


NASHUDIN, SE

NIP. 19660108 199312 1 003

Amuntai, Januari 2022

Analisis Kebijakan Ahli Muda


Dra. Hj. MITA YUSPIANTI, M. IP

NIP. 19671121 199302 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Hj. Siti Rusiah**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai
Utara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. VIVI SUPRIHATI**
Jabatan : **Kabid Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, September 2022

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Dra. VIVI SUPRIHATI

NIP. 19730218 199403 2 001



Dra. Hj. Siti Rusiah

NIP. 19670623 199503 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDY KURNIAWAN, SE**

Jabatan : **Kasubbag Program dan Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. AIDILLAH**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. AIDILLAH
NIP. 19650915 199312 1 001

Amuntai, Juli 2022.

Pihak Pertama,

ANDY KURNIAWAN, SE
NIP 19840805 201001 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah laporan yang disusun	5 Laporan
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	5 Dokumen

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.199.875,-	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.674.875,-	
1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.525.000,-	

Sekretaris



Drs. AIDILLAH

NIP. 19650915 199312 1 001

Amuntai, Juli 2022

Kepala Sub Bagian Program dan Data



ANDY KURNIAWAN, SE

NIP 19840805 201001 1 009

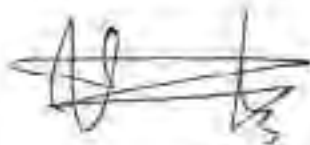
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Sosialisasi, orientasi, pelatihan dan Pembinaan terhadap Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS serta PIK Remaja/Mahasiswa	Jumlah Peserta Sosialisasi	500 Peserta
		Jumlah kelompok yang membuat laporan kegiatan	40 Kelompok

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	158.433.125,-	
1.1	Orientasi /Pelatihan Teknis Pelaksana / Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	86.476.875,-	
1.2	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	71.956.250,-	

Amuntai, September 2022
Analisis Kebijakan Ahli Muda

Kepala Bidang
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera



Dra. VIVI SUPRIHATI
NIP. 19730218 199403 2 001



Dra. Hj. Siti Rusiah
NIP. 19670623 199503 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEPEGAWAIAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **N A N A, S.Sos**

Jabatan : **ANALIS KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Akhmad Maimun**

Jabatan : **Kasubbag Tata Usaha Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Akhmad Maimun

**N A N A, S.Sos
Penata Muda**

NIP. 19650517 198603 1 020

NIP. 19860502 200604 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KEPEGAWAIAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menyiapkan usulan permintaan Karpeg dan Karis/Karsu	Jumlah usulan permintaan Karpeg dan Karis/Karsu	6 Berkas
2	Menyiapkan bahan/berkas usulan kenaikan pangkat	Jumlah bahan/berkas usulan kenaikan pangkat	11 Berkas
3	Menyiapkan usulan persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS	Jumlah usulan persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS	11 Berkas
4	Mengumpulkan dan memeriksa data kepegawain	Jumlah Data Kepegawain Yang Diperiksa	3 Data
5	Pengelola SKP	Jumlah Pengelola SKP	54 Orang
6	Menyusun daftar pegawai yang akan memperoleh kenaikan gaji berkala (KGB)	Jumlah daftar pegawai yang akan memperoleh kenaikan gaji berkala (KGB)	24 Orang
7	Mendata pegawai yang akan menerima penghargaan/tanda jasa	Jumlah data pegawai yang akan menerima penghargaan/tanda jasa	2 Berkas
8	Mendata dan menyiapkan usul pensiun/ Kenaikan pangkat pengabdian	Jumlah data dan menyiapkan usul pensiun/ Kenaikan pangkat pengabdian	2 Orang
9	Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan	Jumlah laporan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan	12 Laporan

Kasubbag. Tata Usaha

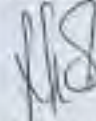


Akhmad Maimun

NIP. 19650517 198603 1 020

Amuntai, Januari 2022

Analisis Kepegawain



NANA, S.Sos

Penata Muda

NIP. 19860502 200604 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADMINISTRASI UMUM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SITI MAHMUDAH**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Akhmad Maimun**
Jabatan : **Kasubbag Tata Usaha Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku utusan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Akhmad Maimun

SITI MAHMUDAH

NIP. 19650517 198603 1 020

NIP. 19730716 200901 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADMINISTRASI UMUM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menerima dan memeriksa surat, naskah dan dokumen yang akan disimpan	Jumlah surat, naskah dan dokumen yang akan diperiksa	50 Berkas
2	Menilai surat, naskah dan dokumen berdasarkan jenisnya	Jumlah surat, naskah dan dokumen berdasarkan jenisnya yang akan di nilai	50 Berkas
3	Membuat nomor indeks masing-masing arsip untuk memudahkan penataan	Jumlah nomor indeks masing-masing arsip untuk memudahkan penataan	20 Nomor Indeks
4	Menata arsip surat, naskah dan dokumen dengan melengkapinya berdasarkan jenis dan pola klasifikasi arsip untuk memudahkan pencarian kembali bila diperlukan	Jumlah arsip surat, naskah dan dokumen dengan melengkapinya berdasarkan jenis dan pola klasifikasi arsip untuk memudahkan pencarian kembali bila diperlukan	70 Pola Klasifikasi
5	Melayani peninjauan arsip, naskah dan dokumen sesuai dengan disposisi	Jumlah Pelayanan peninjauan arsip, naskah dan dokumen sesuai dengan disposisi	12 pelayanan
6	Memelihara keutuhan arsip dan dokumen	Jumlah keutuhan arsip dan dokumen	60 Pemeliharaan
7	Mencatat dan memberi nomor surat keluar masuk	Jumlah Pencatatan dan memberi nomor surat keluar masuk	200 Nomor
8	Mengarsipkan surat keluar dan masuk	Jumlah surat keluar dan masuk yang di arsipkan	900 Berkas

Kasubbag. Tata Usaha



Akhmad Maimun

NIP. 19650517 198603 1 020

Amuntai, Januari 2022

Pengadministrasi Umum



SITI MAHMUDAH

NIP. 19731607 200901 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGOLAH DATA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRMALYASARI, A.Md**

Jabatan : **PENGOLAH DATA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. VIVI SUPRIHATI**

Jabatan : **Kabid Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. VIVI SUPRIHATI

NIP. 19730218 199403 2 001

Amuntai, Januari 2022

Pihak Pertama,

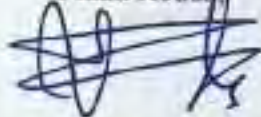
IRMALYASARI, A.Md

NIP. 19881230 201101 2 012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGOLAH DATA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mengetik pembuatan rencana kerja anggaran (RKA)	Jumlah pembuatan rencana kerja anggaran (RKA)	2 Laporan
2	Mengumpulkan dan mengetik SPJ Program Keluarga Sejahtera	Jumlah SPJ Program Keluarga Sejahtera	12 Kegiatan
3	Menginput Databasis Bina Keluarga (BKB, BKR, dan BKL)	Jumlah Databasis Bina Keluarga (BKB, BKR, dan BKL)	36 Laporan
4	Menginput Databasis UPPKS	Jumlah Databasis UPPKS yang di Input	6 Laporan
5	Mengetik surat dan undangan kegiatan Program Keluarga Sejahtera	Jumlah surat dan undangan kegiatan Program Keluarga Sejahtera	200 Laporan
6	Mendokumentasikan kegiatan Pembinaan kelompok Bina Keluarga	Jumlah dokumentasi kegiatan Pembinaan kelompok Bina Keluarga	12 Kegiatan
7	Mengetik laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Keluarga Sejahtera	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Keluarga Sejahtera	12 Laporan

Pihak Kedua,



Dra. VIVISUPRIHATI

NIP. 19730218 199403 2 001

Amuntai, Januari 2022

PENGOLAH DATA



IRMALYASARI, A.Md

NIP. 19881230 201101 2 012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADMINISTRASIAN UMUM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANA MARIATI
Jabatan : PENGADMINISTRASIAN UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhmad Maimun
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Akhmad Maimun

NIP. 19650517 198603 1 020

ANA MARIATI

NIP. 1979 1125 200901 2 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADMINISTRASIAN UMUM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menerima dan memeriksa surat,naskah dan dokumen keuangan yang akan disimpan	Jumlah surat,naskah dan dokumen yang akan diperiksa	50 Berkas
2	Menilai surat,naskah dan dokumen keuangan berdasarkan jenisnya	Jumlah surat,naskah dan dokumen berdasarkan jenisnya yang akan di nilai	50 Berkas
3	Menata arsip surat,naskah dan dokumen keuangan dengan melengkapinya berdasarkan jenis dan pola klasifikasi arsip untuk memudahkan pencarian kembali bila diperlukan	Jumlah arsip surat,naskah dan dokumen dengan melengkapinya berdasarkan jenis dan pola klasifikasi arsip untuk memudahkan pencarian kembali bila diperlukan	70 Pola Klasifikasi
4	Memelihara keutuhan arsip dan dokumen keuangan	Jumlah keutuhan arsip dan dokumen	60 Pemeliharaan
5	Mengetik Surat Pengantar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan	Jumlah pembukuan setiap transaksi ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Harian, Buku Bank, Buku Panjar, Buku Wasdit dan Buku Pajak sesuai dengan sistem pembukuan agar mudah dikendalikan	3 Laporan
6	Mengetik Surat Pengantar Penyampaian Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Pajak Bulanan (SPT Masa) dan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) kepada kantor pelayanan pajak sebagai bukti pembayaran pajak	1 Surat
7	Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan Atasan	Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) dan SP2D untuk dicatat ke dalam buku kendali dan diinput ke aplikasi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan	2 Tugas
8	Mengetik Surat Pengantar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan	Jumlah pembukuan setiap transaksi ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Harian, Buku Bank, Buku Panjar, Buku Wasdit dan Buku Pajak sesuai dengan sistem pembukuan agar mudah dikendalikan	3 Laporan

Kasubbag. Tata Usaha



Akhmad Maimun

NIP. 19650517 198603 1 020

Amuntai, Januari 2022

Pengadministrasian Umum



ANA MARIATI

NIP. 1979 1125 200901 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGELOLA KEUANGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **ANDY KURNIAWAN, SE**

Jabatan : **PENGELOLA KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. LINA INDRIATI, S.Sos**

Jabatan : **KASUBBAG. KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hj. LINA INDRIATI, S.Sos

NIP. 19660618 198803 2 007

Amuntai, Januari 2022

Pihak Pertama,

ANDY KURNIAWAN, SE

NIP. 19840805 201001 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGELOLA KEUANGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menyiapakan Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang keuangan	1 Dokumen
2	Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Surat Penerimaan Pajak (SPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana tertib administrasi	12 Laporan
3	Menyampaikan Bahan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus	Jumlah rincian pengambilan uang dari Bendahara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai alat kendali	12 Surat
4	Mengetik Surat Pengantar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan	Jumlah pembukuan setiap transaksi ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Harian, Buku Bank, Buku Panjar, Buku Wasdit dan Buku Pajak sesuai dengan sistem pembukuan agar mudah dikendalikan	3 Laporan
5	Mengetik Surat Pengantar Penyampaian Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Pajak Bulanan (SPT Masa) dan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) kepada kantor pelayanan pajak sebagai bukti pembayaran pajak	1 Surat
6	Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan Atasan	Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) dan SP2D untuk dicatat ke dalam buku kendali dan diinput ke aplikasi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan	2 Tugas
7	Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan Berdasarkan Hasil Kerja Sebagai Bahan Evaluasi Bagi Atasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan Berdasarkan Hasil Kerja Sebagai Bahan Evaluasi Bagi Atasan	12 Laporan

Pihak Kedua,



Bj. LINA INDRIATI, S.Sos

NIP. 19660618 198803 2 007

Amuntai, Januari 2022

Pengelola Keuangan



ANDY KURNIAWAN, SE

NIP. 19840805 201001 1 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KERJASAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **RAKHMAT SHALEH FAISAL, S.Sos**

Jabatan : **ANALIS KERJASAMA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. TABERANI, M.AP**

Jabatan : **Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai, Januari 2022

Pihak Kedua

Drs. H. TABERANI, M.AP

NIP. 19680925 199303 1 009

Pihak Pertama

RAKHMAT SHALEH FAISAL, S.Sos
Penata Muda

NIP. 19841223 201903 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS KERJASAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menyiapkan Bahan rencana kerja Advokasi, KIE dan Kemitraan	Jumlah Bahan rencana kerja Advokasi, KIE dan Kemitraan	2 Dokumen
2	Menyiapkan Bahan Penyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Bidang KB dan Advokasi	Jumlah Bahan Penyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Bidang KB dan Advokasi	1 Kegiatan
3	Mengetik bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya pada Advokasi, KIE dan Kemitraan untuk Bidang KB dan Advokasi	Jumlah bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya pada Advokasi, KIE dan Kemitraan untuk Bidang KB dan Advokasi yang diketik	3 Dokumen
4	Mengetik bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen laporan kinerja lainnya pada Advokasi, KIE dan Kemitraan untuk Bidang KB dan Advokasi	Jumlah bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen laporan kinerja lainnya pada Advokasi, KIE dan Kemitraan untuk Bidang KB dan Advokasi yang diketik	3 Dokumen
5	Menyiapkan Bahan untuk membina, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan advokasi, KIE dan Kemitraan;	Jumlah Bahan untuk membina, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan advokasi, KIE dan Kemitraan;	3 Kegiatan
6	Menyiapkan Bahan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan advokasi, KIE dan Kemitraan;	Jumlah Bahan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan advokasi, KIE dan Kemitraan	3 Kegiatan
7	Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya	3 Laporan
8	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.	Jumlah tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.	2 Tugas


Amuntai, Januari 2022

Kabid Keluarga Berencana dan Advokasi

Analisis Kerjasama


Drs. H. TABERANI, M.AP

NIP. 19680925 199303 1 009


RAKHMAT SHALEH FAISAL, S.Sos

Penata Muda
NIP. 19841223 201903 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADMINISTRASI UMUM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. NURUL MUHDA, S.Sos**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AKHMAD MAIMUN**

Jabatan : **Kasubbag. Tata Usaha**

**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**AKHMAD MAIMUN
NIP. 19650517 198603 1 020**

Amuntai, Maret 2022

Pihak Pertama,

**Hj. NURUL MUHDA, S.Sos
NIP. 19710615 199703 2 011**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADMINISTRASI UMUM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersusunnya surat, naskah dan dokumen administrasi umum berdasarkan jenisnya	Jumlah surat, naskah dan dokumen administrasi umum berdasarkan jenisnya	25 Berkas
2	Tertatanya arsip surat, naskah dan dokumen administrasi umum berdasarkan jenis dan pola klasifikasi arsip	Jumlah Laporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	25 Pola Klasifikasi
3	Terpeliharanya keutuhan arsip dan dokumen administrasi umum	Jumlah Laporan Kegiatan Penyusunan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	25 Dokumen

Pihak Kedua,



AKHMAD MAIMUN
NIP. 19650517 198603 1 020

Amuntai, Maret 2022

PENGADMINISTRASI UMUM



Hj. NURUL MUHDA, S.Sos
NIP. 19710615 199703 2 011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGELOLA LAYANAN KELUARGA BERENCANA,
BINA KELUARGA REMAJA DAN BINA KELUARGA LANSIA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINALISNAWATI, A.Md Keb**
Jabatan : **PENGELOLA LAYANAN KELUARGA BERENCANA,
BINA KELUARGA REMAJA DAN BINA KELUARGA LANSIA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. VIVI SUPRIHATI**
Jabatan : **Kabid Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai
Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

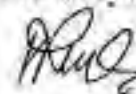
Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Dra. VIVI SUPRIHATI
NIP. 19730218 199403 2 001

Amuntai, Mei 2022

Pihak Pertama,



RINALISNAWATI, A.Md Keb
NIP. 19771115 200604 2 023

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 PENGELOLA LAYANAN KELUARGA BERENCANA,
 BINA KELUARGA REMAJA DAN BINA KELUARGA LANSIA
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menyusun Bahan Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia	Jumlah Bahan Kegiatan BKR dan BKL	2 Laporan
2	Memantau Pengelolaan Data Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia	Jumlah Laporan data BKR dan BKL	16 Laporan
3	Menyusun Laporan Kegiatan Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia	Jumlah Laporan Kegiatan BKR dan BKL	2 Laporan
4	Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BKR dan BKL	2 Laporan

Pihak Kedua,



Dra. VIVI SUPRIHATI
 NIP. 19730218 199403 2 001

Amuntai, Mei 2022

**PENGELOLA LAYANAN KB,
 BKR dan BKL**



RINALISNAWATI, A.Md Keb
 NIP. 19771115 200604 2 023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KB DAN KR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINA MARLINA, A.Md Keb**
Jabatan : **PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN
KB DAN KR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. TABERANI, MAP**
Jabatan : **Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. TABERANI, MAP
NIP. 19680925 199303 1 009

Amuntai, Mei 2022

Pihak Pertama,

RINA MARLINA, A.Md Keb
NIP. 19770101 200604 2 049


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KB DAN KR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menyusun Bahan Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan KR.	Jumlah Bahan Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan KR.	2 Laporan
2	Membantu Melaksanakan Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan KR	Jumlah Laporan Kegiatan Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan KR	2 Laporan
3	Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan KR	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan KR	2 Laporan

Amuntai, Mei 2022

Pihak Kedua,

**PENGELOLA ADVOKASI KONSELING
DAN PEMBINAAN KB DAN KR**


Drs. H. TABERANI, M.AP
NIP. 19680925 199303 1 009


RINA MARLINA, A.Md Keb
NIP. 19770101 200604 2 049



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENYUSUN BAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENY NOVARITA, A.Md. Keb**
Jabatan : **PENYUSUN BAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NASRUDDIN, SE**
Jabatan : **Kabid Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan super visi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NASRUDDIN, SE
NIP. 196601081993121001

Amuntai, Oktober 2022

Pihak Pertama,

HENY NOVARITA, A.Md. Keb
NIP. 199001292017052004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENYUSUN BAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	2 Laporan
2	Memantau Pengelolaan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	6 Laporan
3	Menyusun Laporan Kegiatan Penyusunan Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Kegiatan Penyusunan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	2 Laporan
4	Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	1 Laporan

Amuntai, Oktober 2022

**PENYUSUN BAHAN DATA
KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA**

Pihak Kedua,



**NASRUDDIN, SE
NIP. 19660108 199312 1 001**



**HENY NOVARITA, A.Md. Keb
NIP. 19900129 201705 2 004**

**LAKIP
DPPKB KAB. HSU**



**LAMPIRAN 3
LAPORAN
PENGUKURAN KINERJA**



Laporan PENGUKURAN KINERJA

Triwulan IV Tahun Anggaran 2022


**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022**

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Capaian Tahun Ini terhadap RPJMD / Renstra	Penjelasan Tentang Kendala/keberhasilan Pencapaian Target kinerja Tahun Berjalan
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kategori	A	A	100%	100%	
2.	Meningkatkan Kemandirian Ber-KB	Peserta KB Aktif	%	92	73,60	90%	90%	Adanya dukungan sarana dari BKKBN Perwakilan Provinsi Kalt-Sel sehingga dapat meningkatkan akseptor KB aktif Sumber Data Merupakan Hasil Pendataan Keluarga dan Aplikasi New SIGA, BKKBN.go.id serta Fortapx21.bkkbn.go.id
		Unmet Need (Kebutuhan Ber-KB)	%	2,0	13,82	14,47%	14,47%	Lebih Meningkatkan Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang Program Bangga Kencana Adanya rapat koordinasi sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja petugas KB di lini lapangan, Adanya monitoring dan pembinaan terhadap lini lapangan, kader dan anggota kelompok BKB, SKA, BKL, UPPKS, PK, R/M. Meningkatkan kerjasama seluruh PKG/PLKB, mitra kerja dan jejaring Fasilitas kesehatan di lapangan

Amuntai, Januari 2023

**Kepala Dinas Pengendalian penduduk
dan Keluarga Berencana Kab. HSU**



Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
NIP. 19631120 199203 2 004

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
SEKRETARIS

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan tentang Kendala/keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Tahun Berjalan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100%	
		Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah	%	100	100	100%	
2	Meningkatkan SDM Aparatur Sesuai Tupoksi	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100%	
3	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja Serta Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	%	100	100	100%	
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100%	
		Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	100	100%	

9

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria :

(Sangat Berhasil / Berhasil / Kurang Berhasil / Tidak Berhasil *) SESUAI PILIHAN PIMPINAN

10

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/i melaksanakan hal-hal

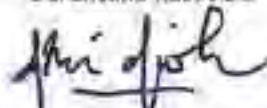
Sebagai berikut :

- 1.
 - 2.
 - 3.
- Dst

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pada Tanggal
 Atasn Langsung Pejabat Yang Dinilai

Amuntai, Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 Berencana Kab. HSU



Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
 NIP. 19631120 199203 2 004

Sekretaris



Drs. AIDILLAH
 NIP. 19650915 199312 1 001

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan Tentang Kendala/keberhasilan Pencapaian Target kinerja Tahun Berjalan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Kependudukan	Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	%	100	100	100 %	
		Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Program KKBPK	%	100	100	100 %	
		Jumlah Institusi yang Mendukung Program KKBPK	Institusi	104	104	100 %	

9

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria :

(Sangat Berhasil / Berhasil / Kurang Berhasil / Tidak Berhasil *) SESUAI PILIHAN PIMPINAN

10

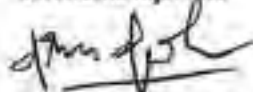
Untuk meningkatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/I melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
 - 2.
 - 3.
- Dst

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
 Atasan Langsung Pelabat Yang Dievaluasi

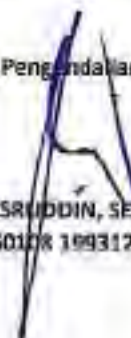
Amuntai, Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 Berencana Kab. HSU



Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
 NIP. 19631120 199203 2 004

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk



NASRUDDIN, SE
 NIP. 19660128 199312 1 001

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN ADVOKASI

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan tentang kendala/keberhasilan pencapaian target kinerja tahun berjalan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Jumlah Akseptor KB sesuai standarisasi pelayanan KB	Jumlah Peserta KB Baru	Akseptor	6.575	3.070	60,38 %	Meningkatkan kerjasama dengan seluruh PKB/PLKB, mitra kerja dan jejaring fasilitas kesehatan di lapangan
		Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan	Akseptor	930	907	97,53 %	Meningkatkan kerjasama dengan seluruh PKB/PLKB, mitra kerja dan jejaring fasilitas kesehatan di lapangan
		Persentase peserta KB baru pria	%	8	0,55	0,88 %	Lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB Pria
		Persentase Peserta KB MKUB	%	10	10,45	104,50 %	
		Jumlah Desa yang terjangkau program KKBPk	Desa/ Kelurahan	219	219	100 %	
		Jumlah Desa yang dibina	Desa/ Kelurahan	219	219	100 %	

9

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria :

(~~Sangat Berhasil~~ Berhasil) Kurang Berhasil / Tidak Berhasil *) SESUAI PILIHAN PIMPINAN

10

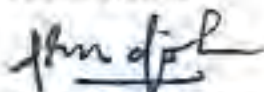
Untuk meningkatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/i melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- Dst.

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
 Atasn Langsung Pejabat Yang Dievaluasi

Amintal, Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 Berencana Kab. HSL



Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
 NIP. 19691120 199203 2 004

Kepala Bidang Keluarg. Berencana & Advokasi



Drs. H. TABERUNI, MAP
 NIP. 19680925 199303 1 009

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan tentang kendala/keberhasilan pencapaian target kinerja tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga yang memiliki balita yang ikut BK3	%	75	72,5	96,67	%	Adanya pembinaan terhadap kader dan anggota kelompok BKB
		Persentase keluarga yang memiliki remaja yang ikut BKR	%	70	54,21	77,44	%	Adanya pembinaan terhadap kader dan anggota kelompok BKR
		Persentase keluarga yang memiliki lansia yang ikut BKL	%	65	63,84	98,22	%	Adanya pembinaan terhadap kader dan anggota kelompok BKL
		Persentase keluarga yang ikut UPPKS	%	5	4,12	82,40	%	Adanya pembinaan terhadap kader dan anggota kelompok UPPKS
		Persentase remaja yang ikut PIK	%	8	33,44	418	%	Perlu meningkatkan pembinaan terhadap kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tumbuh dan Tegak agar dapat menjadi PIK Remaja/Mahasiswa Tegak

9

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria :

(Sangat Berhasil / Berhasil / Kurang Berhasil / Tidak Berhasil *) SESUAI PILIHAN PIMPINAN

10

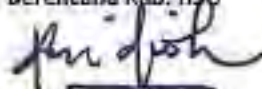
Untuk meningkatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/ melaksanankan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
 - 2.
 - 3.
- Dst

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
 Alasan langsung Pejabat Yang Dievaluasi

Amuntal, Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 Berencana Kab. HSU



Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP
 NIP. 19681120 199203 2 004

Kabid Pemberdayaan Keluarga Sejahtera



Dra. VIVISAPRIHATI
 NIP. 19730218 199403 2 001

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan Tentang Kendala/Keberhasilan Pencapaian Target kinerja Tahun Berjalan	
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Merencanakan dan Mengadakan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Persentase Pemanahan kebutuhan jaringan Telepon, Listrik, Air dan Internet	%	100	100	100	%	Kegiatan rutin berupa pembayaran jasa PDAM, Listrik, Telepon dan Internet
		Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	59	59	100	%	Alat Tulis Kantor untuk kegiatan kantor telah terpenuhi sesuai kebutuhan
		Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Jenis	13	13	100	%	Barang yang dicetak dan digandakan telah terpenuhi sesuai kebutuhan
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang dibutuhkan	Jenis Komponen	17	17	100	%	Kondisi Jaringan Listrik terbilang masih baik sehingga perbaikan yang dilakukan disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	67	67	100	%	Barang yang dibeli sesuai kebutuhan kantor
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	27	27	100	%	
2.	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang berpakaian sesuai ketentuan	Orang	34	34	100	%	
		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Orang	4	0	0	%	Tidak ada pemanggilan Bimtek dan SKPD yang berwenang

9

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria :

(Sangat Berhasil / Berhasil / Kurang Berhasil / Tidak Berhasil *) SESUAI PIUHAN PIMPINAN

10

Untuk mengingatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/i melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

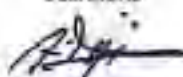
- 1.
- 2.
- 3.

Dst

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
 Atasan Langsung Pejabat Yang Dievaluasi

Amuntal, Januari 2023

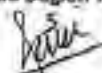
Sekretaris



Drs. AIDILLAH

NIP. 19650915 199312 1 001

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



AHMAD MAIMUN

NIP. 19650517 198602 1 020

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan Tentang Kendala/keberhasilan Pencapaian Target kinerja
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	Orang	23	23	100 %	
		Jumlah laporan keuangan daerah yang dibuat	Laporan	1	1	100 %	
2	Memelihara Sarana dan Prasarana Kerja agar dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Buah	5	5	100 %	Kendaraan dinas/operasional rutin dipelihara sesuai jumlah kendaraan dinas yang dipegang oleh DPPKB
		Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	Buah	111	111	100 %	Kendaraan dinas/operasional rutin dipelihara sesuai jumlah kendaraan dinas yang dipegang oleh DPPKB
		Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	Buah	44	44	100 %	Peralatan kantor rutin dipelihara sesuai kebutuhan
		Jumlah Peralatan pendukung gedung Kantor Yang dipelihara	Buah	16	16	100 %	Peralatan kantor rutin dipelihara sesuai kebutuhan

9

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria :

*(Sangat Berhasil / Berhasil / Kurang Berhasil / Tidak Berhasil *)* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

10

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/I melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
 - 2.
 - 3.
- Dst

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
 Atasn Langsung Pejabat Yang Dievaluasi

Amuntai, Januari 2023

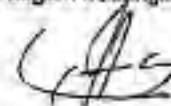
Sekretaris



Drs. AIDILLAH

NIP. 19650915 199312 1 001

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset



Hj. LINA INDRATI, S.Sos

NIP. 19660618 198803 2 007

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan Tentang Kandala/kobherhasilan Pencapaian Target kinerja Tahun Berjalan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	5	5	100 %	Dokumen yang telah selesai dikerjakan berupa dokumen Tapkin (PK) 2022, Renstra 2023-2026, Renja 2023, RKA dan DPA 2022
		Jumlah Laporan yang disusun	Laporan	5	5	100 %	Laporan yang telah selesai dikerjakan berupa LPPD, LKPJ, LakiP, dan Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan I

9

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria :

(Sangat Berhasil / Berhasil / Kurang Berhasil / Tidak Berhasil *) SESUAI PILIHAN PIMPINAN

10

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/i melaksanakan hal hal sebagai berikut :

- 1.
 - 2.
 - 3.
- Dst

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
 Atasari Langsung Pejabat Yang Dievaluasi

Amuntai, Januari 2023

Sekretaris



Drs. AIDILLAH

NIP. 19650915 199312 1 001

Kepala Sub Bagian Program dan Data



ANDY KURNIAWAN, SE

NIP 19840805 201001 1 009

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
ANALIS KEBUAKAN AHLI MUDA

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan tentang kendala/keberhasilan pencapaian target kinerja tahun berjalan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terlaksananya pemberitukan rumah data kependudukan	Jumlah rumah data kependudukan yang terbentuk	Rumah data kependudukan	3	3	100 %	

9

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjajihkan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria :

(*Sangat Berhasil / Berhasil / Kurang Berhasil / Tidak Berhasil* *) SESUAI PILIHAN PIMPINAN

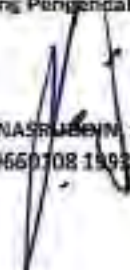
10

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/I melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- Dst


Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
 Atasan Langsung Pejabat Yang Dievaluasi

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk


 NASRUDIN SE
 NIP. 19660708 199312 1 001

Amuntal, Januari 2023

ANALIS KEBUAKAN AHLI MUDA


 Dra. ISMAWATI
 NIP. 19670818 199312 2 002

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
ANALIS KEBUJAKAN AHLI MUDA

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan tentang kendala/kabersihan pencapaian target kinerja tahun berjalan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terlaksananya kegiatan workshop di sekolah	Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Kegiatan Workshop	Sekolah	10	10	100 %	
		Jumlah Sekolah Yang menerima advokasi pendidikan kependudukan	Sekolah	12	12	100 %	
		Jumlah Stakeholders dan mitra kerja yang memanfaatkan data kependudukan	Stakeholders dan mitra kerja	15	15	100 %	

9

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria :

(*Sangat-Berhasil / Berhasil / Cukup-Berhasil / Tidak-Berhasil* *) SESUAI PILIHAN PIMPINAN

10

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/i melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- Dst

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
 Atasan Langsung Pejabat Yang Dievaluasi

Amuntai, Januari 2023

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

NARSU DIR, SE
 NIP. 19660108 199312 1 001

ANALIS KEBUJAKAN AHLI MUDA

Dra. Hj. MITA YUSPIANTI, M. IP
 NIP. 19671121 199302 2 002

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
ANALIS KEBUAKAN AHLI MUDA

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan tentang kendala/keberhasilan pencapaian target kinerja tahun berjalan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tertaksananya Pengelolaan Data Mikro Program KKBPK	Jumlah Desa yang mempunyai Data Mikro Keluarga	Desa/Kelu- rahan	219	219	100 %	Sudah tersedianya data basis online data mikro keluarga http://pk.bkkbn.go.id

9

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria :

*(Sangat-Berhasil / Berhasil / Kurang-Berhasil / Tidak-Berhasil *)* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

10


Untuk meningkatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/i melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
 - 2.
 - 3.
- DsL


Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
 Atasan Langsung Pejabat Yang Dievaluasi

Amuntal, Januari 2023

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk


NASRUDDIN, SE
 NIP. 19660108 199312 1 001

ANALIS KEBUAKAN AHLI MUDA


MAHYUNI, S.KM, M.IP
 NIP. 19721104 199303 1 004

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan tentang kendala/keberhasilan pencapaian target kinerja tahun berjalan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terlaksananya Promosi kelompok kegiatan (poktan)	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	Kegiatan	2	2	100 %	Karena Adanya Pandemi Covid-19 Kegiatan Pameran tidak dapat dilaksanakan
		Jumlah sarana kelompok keparan (poktan) yang dicetak	Jenis	4	4	100 %	

9

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria :

*(Sangat Berhasil / Berhasil / Kurang Berhasil / Tidak Berhasil *)* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

10

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/ melaksanakn hal-hal sebagai berikut :

- 1.
 - 2.
 - 3.
- Dst.

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
 Atasan Langsung Pejabat Yang Dievaluasi

Amuntai, Januari 2023

Kabid Pemberdayaan Keluarga Sejahtera



Dra. VIVA SUPRIHATI
NIP. 19730218 199403 2 001

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIMULAN IV TAHUN 2022
UNAS PENGENDALIAN PENDIDIK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULLI SUNGAI UTARA
ANALIS KERJAKAN AHLI MUDA

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan tentang kendala/keberhasilan pencapaian target kinerja tahun berjalan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terlaksananya Sosialisasi, orientasi, pelatihan dan pembinaan terhadap Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS serta PIK Remaja/Mahasiswa	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang	500	500	100 %	Kegiatan pelatihan pengurus PKK Remaja telah selesai dilaksanakan, untuk kegiatan lainnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan pengurangan belanja langsung sebesar 50% akibat pandemi COVID-19
		Jumlah Kelompok yang membuat laporan kegiatan	Kelompok	0	0	0%/0%	Adanya kebijakan pengurangan anggaran belanja

9

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjelaskan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria :

(Sangat Berhasil) **Berhasil** Kurang Berhasil / Tidak Berhasil *) SESUAI PILIHAN PIMPINAN

10

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/i melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
 - 2.
 - 3.
- Dst.

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
 Atasan Langsung Pejabat Yang Dievaluasi

Amuntai, Januari 2023

Kabid Pemberdayaan Keluarga Sejahtera



Dra. VIVI SUPRIHATI
 NIP. 19730218 199403 2 001

ANALIS KEBUJAKAN AHLI MUDA



Dra. Hj. SITI RUSIAH
 NIP. 19670623 199503 2 002

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan tentang kendala/keberhasilan pencapaian target kinerja tahun berjalan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terlaksananya KIE tentang Program KKBPK	Jenis Media KIE	Jenis	4	4	100 %	
		Jumlah Mitra Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan KKBPK	Organisasi	3	3	100 %	
		Jumlah pengelola advokasi konseling dan pembinaan KB dan KR	Orang	21	21	100 %	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan IMP	Kegiatan	3	3	100 %	

9

PENILAIAN PIMPINAN
 Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria :
*(Sangat Berhasil / Berhasil) / Kurang Berhasil / Tidak Berhasil ** SESUAI PILIHAN PIMPINAN

10

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/i melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 1.
 2.
 3.
 Dst

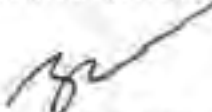
Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
 Atasan Langsung Pejabat Yang Dievaluasi

Amuntai, Januari 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


 Drs. H. TABERANI, MAP
 NIP. 19880925 199303 1 009


 M. YUSUF, S.Sos
 NIP. 19660104 199201 1 001

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan tentang kendala/keberhasilan pencapaian target kinerja tahun berjalan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terlaksananya Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Klinik yang mendapatkan operasional dan melaporkan Penyaluran Alat Kontrasepsi	Klinik	45	45	100 %	
		Jumlah peserta sosialisasi MKJP dan PUP	Orang	600	600	100 %	

9

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria :

(*Sangat Berhasil* / **Berhasil** / *Kurang Berhasil* / *Tidak Berhasil* *) SESUAI PILIHAN PIMPINAN

10

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/i melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
 - 2.
 - 3.
- Dst


Tesis dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
 Atasan Langsung Pejabat Yang Dievaluasi

Amuntai, Januari 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


 Des. H. TABERANI, MAP
 NIP. 19680925 199303 1 009


 Hj. RUSITAH, Am.Keb
 NIP. 19680220 198803 2 004

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
ANALIS KEBUAKAN AHLI MUDA

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Capaian			Penjelasan tentang kendala/keberhasilan pencapaian target kinerja tahun berjalan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terlaksananya Pelayanan KB	Jumlah Peserta Pelayanan KB MKJP	Akseptor	200	200	100 %	Kegiatan menggunakan Dana DAK Non Fisik
		Jumlah Peserta Pelayanan KB MKJP Pria	Akseptor	0	0	#DIV/0!	Adanya kebijakan pengurangan anggaran belanja

9

PENILAIAN PIMPINAN

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian target diatas saudara termasuk dalam kriteria

*(Sangat Berhasil / Berhasil / Kurang Berhasil / Tidak Berhasil *)* SESUAI PILIHAN PIMPINAN

10


Untuk meningkatkan Capaian Kinerja tersebut di atas, diminta agar Saudara/I melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- Dst


Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
 Atasan Langsung Pejabat Yang Dievaluasi

Amuntai, Januari 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi


 Drs. H. TABERANI, MAP
 NIP. 19680920 199303 1 009

ANALIS KEBUAKAN AHLI MUDA


 ERNAWATI, Am. Keb
 NIP. 19710905 199103 2 005

**LAKIP
DPPKB KAB. HSU**



**LAMPIRAN 4
FOTO-FOTO KEGIATAN
TAHUN 2022**



Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi Penguatan Pengelolaan Pelayanan KB dan KB PP Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten HSU

@dppkbhsu

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahstunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi Dihadiri Seluruh PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) Stafugas Kontrol PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Senin, 07/03/2022

@dppkbhsu

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahstunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi 7 Dimensi Lensa Tangguh Dan Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lensa Tingkat Kab. Hulu Sungai Utara Di sampaikan Oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Senin, 14 Maret 2022

@dppkbhsu

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahstunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Rapat Koordinasi

Pembentukan TIM Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Senin, 14 Maret 2022

@dppkbhsu

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahstunting
Jl. Empu Mandasana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Rapat Koordinasi

Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Keluarga Berencana Kab. Hulu Sungai Utara
Mengadakan Rapat Koordinasi yang Dipimpin Oleh
Drs. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP (Kepala DPPKB Kab. HSU)
Rabu, 13 April 2022

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahstunting
Jl. Empu Mandasana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Rapat Pembentukan

Tim Audit Stunting Tahun 2022- 2024 sekaligus Penandatanganan MOU
dengan Perguruan Tinggi STIA Amuntai dan STAI RAKHA Amuntai yang dihadiri
Kepala Dinas DPPKB Kab. HSU (Drs. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP)
Rabu, 20 April 2022

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahstunting
Jl. Empu Mandasana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara





Apel Siaga TPK

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. Hulu Sungai Utara, mengikuti Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Nusantara Bergerak, melalui Zoom meeting bertempat Di Gedung Agung lantai 3 Amuntai Kamis, 12 Mei 2022

[@dppkbhsu](#) [DPPKB KAB HSU](#)

[#pemkabhsu](#) [#dppkbhsu](#) [#banggakencana](#) [#cegahstunting](#)
 Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara





Amuntai EXPO Tahun 2022

DPPKB Kab. HSU Bidang KB, Dektuk, KB/Kebokas Mengikuti Kegiatan Damaran pembangunan dan Amuntai EXPO Tahun 2022 Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara ke-70 yang diselenggarakan pada tanggal 14 s/d 21 Mei 2022 Bertempat di Jl. Basuki Rahmat Amuntai (Depan Lapangan Pahlawan Amuntai)

[@dppkbhsu](#) [DPPKB KAB HSU](#)

[#pemkabhsu](#) [#dppkbhsu](#) [#banggakencana](#) [#cegahstunting](#)
 Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara





Gebayor Pelayanan KB Gratis

DPPKB Kab. HSU Melakukan Kegiatan Gebayor Pelayanan KB Gratis Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara ke-70 & HUT 101 (pakan Bidan Indonesia) ke-71 sekaligus Memperingati Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-25, yang bekerjasama dengan SAZNAS Kab HSU, IB Kab HSU Dan Kadin 5001 Kab. Hulu Sungai Utara. Yang dilaksanakan di 6 Kampung KB Di Desa Karas Dalam, Desa Pandang Bangkal, Desa Muring Asan, Desa Hambuku Baru, Desa Telaga Mas, Desa Baru.

[@dppkbhsu](#) [DPPKB KAB HSU](#)

[#pemkabhsu](#) [#dppkbhsu](#) [#banggakencana](#) [#cegahstunting](#)
 Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Orientasi Pencegahan Stunting Dari Hibu

DPPKB Kab. HSU, Bidang KS beserta jajaran, dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan kegiatan "Orientasi Pencegahan Stunting Dari Hibu" (implementasi Elemen TK, kab/kota) yang dihadiri 24 orang dari (Natal Pengujian Keluarga Berencana) BKKR 6e Koc. HSU, Perwakilan TP.PKE Kab. HSU, Perwakilan Suppedairibang, Perwakilan Kementerian Agama Kab. HSU, Bertempat Di Aula DPPKB Kab. HSU, Babu (18/15/22).

#dppkbhsu #dppkb_kab_hsu

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahstunting
Jl. Empu Mandassana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Renahub Stunting

Sebagai komitmen dalam melakukan Doregapan Pencegahan dan Penurunan Stunting maka BKKBN dan HSU, Hulu Sungai Utara melaksanakan Aksi (Tiga) yaitu "Rendah Stunting", dengan tema "Bongkar "Kuliner" KakaPaku" (Bergerak Bekas Stunting Hibu Wantap) MELAKUKAKAN "SARU 30-50" (Percoba Aksi Berencana-Pencapaian Penurunan Angka Stunting (Inovasi) Babu, 08 Juli 2022.

#dppkbhsu #dppkb_kab_hsu

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahstunting
Jl. Empu Mandassana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Pemutakhiran Verifikasi dan Validasi Data

Orientasi Pemutakhiran Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting, di Hadiri Kader KB/TK (Tim Pendamping Keluarga) seluruh Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di Aula Dinae Pengendalian Penduduk dan KB (Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Banjarang, Haur Daling, Kamei (AK), Aula Kario Kecamatan Donsau Panggang (Kecamatan Donsau Panggang, Paminggir, Sungai Tabukan), Senin (13/6), Aula Dinae Pengendalian Penduduk dan KB (Kecamatan Amuntai Selatan, Babirik, Sungai Pardeni).

#dppkbhsu #dppkb_kab_hsu

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahstunting
Jl. Empu Mandassana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor

Sebagai rangkaian Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-39 Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penyakit dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. Hulu Sungai Utara menyelenggarakan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor. Pelaksanaan serentak di 10 Kecamatan di Kab. Hulu Sungai Utara dengan tempat pelayanan di seluruh Puskesmas dan Balai Penyuluhan KB di wilayah Kab. Hulu Sungai Utara. Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor merupakan agenda Nasional BKKBN. (Rabu 15 Juni 2022).

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahtunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Luncurkan Dapur Sehat After Stunting

Dinas Pengendalian Penyakit dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. Hulu Sungai Utara menggelar kegiatan LUNCURUNG DAPUR SEHAT AFTER STUNTING (MAGIAT) PERS KOTA, 23 JUNI 2022 di MANGUNG HO Desa Maruh Tubing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Balai Desa Maruh Tubing.

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahtunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Peringatan Harganas Ke-39

DPPKB Kab. Hulu Sungai Utara menggelar spal peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-39 Tahun 2022, di Halaman Kantor (DPPKB HSU, Kamis 17/06/2022). Menganjurkan tema "Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting", oleh pimpinan Pribadana Yugas (PI) Bupati HSU Husein Abdi, diikuti oleh Kepala DPPKB HSU (Drs. H) Amrah Saaidah, M.AP) beserta jajaran, Purna Tugas Kepala DPPKB Kab. HSU, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan se Kab. HSU, Kader KB Se Kab. HSU, Mitra Bangsa terencana DPPKB HSU, Duta Cegah HSU, Ketua MKP HSU (H. M. Said Madarwan, Lc), para Camat, Kepala SMPD se Kab. HSU, perwakilan Kadim (DPPKB HSU), Wakil TP PKK kab. HSU (H) Erlancer Fauziah Nasikh), Ketua IBI Kab. HSU Dan Perwakilan Segas Stunting (dr M. Hidayatullah)

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahtunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Pengambilan Sekolah Lanjutan

DPPKB Prov. Kalimantan Selatan melalui DPPKB Kab. HSU meluncurkan Sekolah Lanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022. Peresmian dilakukan oleh Pdt. Bupati Kab. HSU di Wakilkan oleh Bak. Jumadi, S. AP, M.T, di Halaman Kantor Lurah Kebun Sari, kec. Amuntai Tengah, Kamis (29/7/2022) di dampingi Dra. Hj. Anisah Riyadati, M.AP, (Kepala DPPKB Kab. HSU)

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pembkabhsu #dppkbhsu #banggakantana #cegahtumling
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Pendampingan Tim Audit Startup

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. Hulu Sungai Utara, melakukan kegiatan pendampingan Tim Audit Startupnya Identifikasi dan Seleksi Usaha di Kab. Hulu Sungai Utara, di dampingi Dra. Hj. Anisah Riyadati, M.AP (Kepala DPPKB Kab. HSU) beserta (jarko), dengan jumlah peserta 30 orang. Berlangsung di Aula DPPKB Kab. HSU, pada (08/08/2022)

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pembkabhsu #dppkbhsu #banggakantana #cegahtumling
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Grand Final Data Genre 2022

Sebanyak 20 peserta masuk dalam Grand Final pemilihan Data Genre Kab. HSU Tahun 2022 yang kembali digelar DPPKB Kab. HSU. Mengusung tema "Remaja Berprestasi Data Genre HSU Semakin Maju" kegiatan ini digelar di Aula Gr KH Islam Chaid Amuntai, Jum'at (26/8/2022), sekaligus pengukuhan kepada Dra. Hj. Anisah Riyadati, M.AP (Kepala DPPKB Kab. HSU) oleh Ir. H. Samitan, MA (Kepala Perwakilan BKKH Prov. Kalimantan Selatan) Sebagai Bunda Genre Kab. HSU.

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pembkabhsu #dppkbhsu #banggakantana #cegahtumling
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Penyerahan Penghargaan

DPPKB Kab. HSU Bidang KB Menghadiri kegiatan Koordinasi Intensifikasi Pelayanan KB di Feskes dan Pelayanan Akses Pelayanan KB di Feskes sekaligus penyerahan penghargaan terbaik atas kontribusinya dalam peningkatan keertan KB pada kegiatan pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi bersama Mitra kerja dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022 yang di serahkan langsung oleh Bapak dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (Kapala BKKBN) kepada Bpk. Letkol Inf Dhuwi Hendradjaja, S.Sos, M.I.Pol (Kamandan KODIM 1001/HSU-6LG) Selasa, 4 September 2022 di Hotel Galaxy Kota Banjarbaru.

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cepattunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Pelayanan KB Dalam Rangka TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu 2022

DPPKB Kab. HSU melalui Bidang KB menyelenggarakan Pelayanan KB Cermat dilaksanakan di KODIM 1001/HSU-6LG Kab. HSU. Pelayanan KB Cermat ini merupakan implementasi perjanjian kerja sama antara BKKBN dan TNI untuk peningkatan dan juga berpacapan pencapaian sasaran program bangsa bersama, serta penerapan penunjang sunting rumah jiwa melalui sterilisasi keluarga dan sebagai pihak melalui momentum bakti TNI Manunggal, salah satunya adalah Pelayanan KB ABCP pada hari Kamis 8 September 2022.

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cepattunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Perencanaan Kabor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) TK. Kabupaten Hulu Sungai Utara 2022

Melindak lanjut hasil Rapat Pertemuan Koordinasi (TPPS) Tk. Prov. Kalsel pada tanggal 5-6 September 2022 di Banjarbaru, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan Pertemuan Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kab. HSU Tahun 2022, bertempat di Gedung Agung Jantani II Setda Kab. HSU, Selasa, 13 September 2022.

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cepattunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Praktek Lapangan Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Bidan

Klinik Tiga Serangkai Melalui DPPKB Kab. HSU menyelenggarakan Praktek Lapangan Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi bidan. Bertempat di Ruang Pelayanan DPPKB Kab. HSU Kamis (22/09/2022). Sebanyak 18 Akseptor terdiri dari 9 IUD dan 9 Implan dari Kecamatan Sungai Tabukan berjumlah 9 Akseptor, Kecamatan Amuntai Tengah 4 Akseptor dan Kecamatan Amuntai Selatan 6 Akseptor.

[@dppkbhsu](#) [DPPKB KAB HSU](#)

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahtunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Diseminasi Audit Kasus Stunting T. Kab. HSU

Sebagai bentuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan rencana aksi nasional penurunan stunting (RAN-PSCT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara sekaligus meningkatkan hasil kegiatan pemantauan Tim Audit Stunting Identifikasi dan pelaksnanya pada Bulan 10 Agustus 2022, Dinas Pengendalian Demografi dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar pertemuan diseminasi audit kasus stunting bertempat di Aula Lantai II DPPKB Kab. HSU Selasa (27/08/2022).

[@dppkbhsu](#) [DPPKB KAB HSU](#)

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahtunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2022

Dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia atau World Contraception Day (WCD) Tahun 2022 dan sekaligus puncak pelayanan KB dalam rangka Tih: Hari Unggul Bangsa Kencana Kesehatan. Sesuai arahan kepala Perwakilan BKKBN Prov. Kalimantan 1208/KB 04/23/2022, DPPKB Kab. Hulu Sungai Utara menyelenggarakan Pelayanan KB Gratis sorentak di 10 Kecamatan di Kab. HSU dengan tempat pelayanan di seluruh Fasilitas Kesehatan (FasKes) di wilayah kab. Hulu Sungai Utara. (Kamis, 29 September 2022)

[@dppkbhsu](#) [DPPKB KAB HSU](#)

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahtunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Rapat Penelaahan (Revisi) Program Bangsa Kencana dan PPS Tingkat Prov. Kalimantan Selatan

Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M. AP (Kepala DPPKB, Kab. HSU) beserta jajaran Kabid KB-Advokasi, Kabid Daiduk, Kabid PKS dan keubag program dan data, menghadiri Rapat Penelaahan (Revisi) Program Bangsa Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan TA 2022 guna mengevaluasi capaian Program Bangsa Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting dengan tema "Akselerasi Percepatan Penurunan Stunting Melalui Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas" bertempat di Aula "Serentang-Serambung" Kantor Bupati Tanah Laut pada tanggal 18 Srd 19 Oktober 2022.

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cepatstunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Sekolah Rencana Tidak Layak Audit Kasus Stunting Tl. Kab. Hulu Sungai Utara

Dalam rangka mendukung pemangsaan dan pencapaian penurunan stunting dan rencana aksi nasional penurunan penurunan stunting 100% (NAPAS) di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui pendekatan hasil kegiatan Diarahkan Audit Kasus Stunting pada Selasa, 27 September 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. Hulu Sungai Utara menggelar kegiatan sekolah tidak layak audit kasus stunting bertempat di Aula Lantai II Kantor Kab. HSU Hulu (22/9/2022).

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cepatstunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Penyerahan Bantuan Sembako Oleh BKKBN Prov. Kalsel Kedesa Locus Stunting

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. Hulu Sungai Utara melalui Bidang KB-Advokasi, Dra. Hj. Anisah Rasyidah, M.AP (Kepala DPPKB Kab. HSU) beserta jajaran melakukan kunjungan dan Penyerahan bingkisan Sembako dari BKKBN Prov. Kalsel untuk Kasus Audit Kasus Stunting kedesa Locus Stunting di 5 Kecamatan di Kab. HSU

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cepatstunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara





Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan Bagi Remaja

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. Hulu Sungai Utara (Hulu) melalui Bidang Dinkes (Pengendalian Penduduk) menggelar acara Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan Bagi Remaja bertempat di Aula Lantai II DPPKB Kab. HSU Pada hari Rabu (09/11/2022). Yang di hadiri sebanyak 80 siswa & siswa yang di sukutkan setiap sekolah 3 orang terdiri dari Sekolah SMAN 1 Amuntai, MAN 2 Amuntai, RTN 2 Amuntai, SMAN 2 Amuntai, DPPKB 4 Amuntai, MAN 1 Amuntai, MA NUR RAHMA, AMUNTAI dan SMA 1 AMUNTAI.

#dppkbhsu #DPPKB KAB HSU

#perwakilan@dppkbhsu #bangpakawencana #cegahtunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara





Materi Kependudukan Dalam Fasilitas Agama Islam (PAI) Bagi Penyuluh Agama Dan Tokoh Agama

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. Hulu Sungai Utara melalui Bidang Dinkes (Pengendalian Penduduk) menggelar acara Materi Kependudukan Dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) Bagi Penyuluh Agama Dan Tokoh Agama bertempat di Aula Lantai II DPPKB Kab. HSU Pada hari Kamis (10/11/2022). Yang di hadiri sebanyak 30 terdiri dari Penyuluh Agama dan Tokoh Agama di Kab. Hulu Sungai Utara.

#dppkbhsu #DPPKB KAB HSU

#perwakilan@dppkbhsu #bangpakawencana #cegahtunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara





Mendorong Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Perwakilan BKKBN Prov. Kaltel dan DPPKB Kab. HSU melaksanakan Kegiatan Cegah Stunting Bersama Keluarga Melalui 1000 HPK dan juga di hari yang sama dilaksanakan Penguatan Kemitraan Kampung KB (Keluarga Berkeluarga) sebagai upaya peningkatan kualitas Kampung KB yang ada di Kab. HSU dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di kampung KB Melalui Launching DASHAT (Dapur Sehat Atas Stunting) yang dipimpin di bala serera resmi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Kaltel (Ir. H. Ramlan, MA) bertempat di Kampung KB Paminggir Seberang, Pada Rabu (23/11/2022).

#dppkbhsu #DPPKB KAB HSU

#perwakilan@dppkbhsu #bangpakawencana #cegahtunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Audit Kasus Stunting Tingkat Kecamatan

Dalam rangka mendingkat percepatan penurunan stunting di kabupaten Hulu Sungai Utara, salah satunya investasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Audit Kasus Stunting adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber daya lainnya. Berkaitan dengan hal itu DPPKB Kab. HSU melalui bidang KR-Advokasi melaksanakan kegiatan Audit Kasus Stunting Tingkat Kecamatan bertempat di Aula Kantor kes. Amerta Selatan, Senin (05/12/2022).

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahstunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Sosialisasi Program Bapak Anak Anak Stunting

Dalam rangka pengenalan Program BAAS (Bapak Anak Anak Stunting) di Kab. Hulu Sungai Utara dan sebagai tindak lanjut dari pengakuan Spk. Letkol Inf Dhuwi Rahardjaja, S.Sos, M.I Pol (Komandan KODIM 1006/HSU-BlC) sebagai Bapak Anak Anak Stunting di Kab. HSU yang telah dilaksanakan pada Jum'at 30 September 2022. Untuk itu DPPKB Kab. HSU melalui Bidang PKS (Pembudayaan Keluarga Sejahtera) melakukan kegiatan Sosialisasi Program BAAS, yang di selenggarakan di Gedung Agung Lantai II Setda Kab. HSU, Kamis (28/12/2022).

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahstunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara



Sosialisasi Program Bapak Anak Anak Stunting

Dalam rangka pengenalan Program BAAS (Bapak Anak Anak Stunting) di Kab. Hulu Sungai Utara dan sebagai tindak lanjut dari pengakuan Spk. Letkol Inf Dhuwi Rahardjaja, S.Sos, M.I Pol (Komandan KODIM 1006/HSU-BlC) sebagai Bapak Anak Anak Stunting di Kab. HSU yang telah dilaksanakan pada Jum'at 30 September 2022. Untuk itu DPPKB Kab. HSU melalui Bidang PKS (Pembudayaan Keluarga Sejahtera) melakukan kegiatan Sosialisasi Program BAAS, yang di selenggarakan di Gedung Agung Lantai II Setda Kab. HSU, Kamis (28/12/2022).

@dppkbhsu DPPKB KAB HSU

#pemkabhsu #dppkbhsu #banggakencana #cegahstunting
Jl. Empu Mandastana No. 12 Kab. Hulu Sungai Utara